

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PANGAN**



**LAPORAN KINERJA**  
**TAHUN 2017**

**PADANG, JANUARI 2018**

# Kata Pengantar



Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (LKj Dinas Pangan Sumbar) ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah menjadi kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

LKj Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pangan Sumbar. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pangan Sumbar ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Pangan Sumbar untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pangan Sumbar memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari empat indikator yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pangan Sumbar memperlihatkan hasil yang **sangat baik**, dengan kata lain hampir seluruhnya terealisasi bahkan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2017.

Namun demikian, masih dirasa perlu dilakukan perbaikan guna penyempurnaan di masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pangan Sumbar Tahun 2017 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Padang, Januari 2018  
KEPALA DINAS PANGAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT,

Tr. E F E N D I, MP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630515 199003 1 006

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (LKj Dinas Pangan Sumbar) Tahun 2017 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021. **Visi** tersebut yakni “ **Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal** “. Sesuai dengan visi tersebut, maka **misi** Dinas Pangan adalah 1) *Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal*; 2) *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan*; 3) *Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan*; dan 4) *Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan*

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah *pertama*: Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal; *kedua*: Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan sertaantisipasi kerawanan pangan; *ketiga*: Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan utama; *keempat*: Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur dalam mewujudkan Kemandirian Pangan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat; *Kedua* adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat; *Ketiga* adalah Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen; *Keempat* adalah Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Sedangkan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dari keempat sasaran tersebut sebagai berikut : *pertama* : Skor Pola Pangan Harapan (PPH); *kedua* : Ketersediaan Pangan Utama Beras; *ketiga* : Stabilisasi Harga Bahan Pangan Utama (beras dan cabe merah) di tingkat Konsumen; *keempat* : Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat Produsen.

Program dan kegiatan Dinas Pangan Tahun 2017 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan pangan. Isu-isu tersebut antara lain meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan. Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 100,17 %. Capaian kinerja yang tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat, yaitu sebesar 100,83%, diikuti berturut-turut dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar 100 %, dan sasaran Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen sebesar 100%.
2. Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD. Akuntabilitas keuangan perprogram untuk pencapaian sasaran tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI KEUANGAN	% REALISASI FISIK
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5.604.000.000	5.464.642.700	97,51	100
2	Program Diversifikasi Pangan	950.000.000	931.730.839	98,08	100
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.030.500.000	5.854.646.332	97,08	99,02
	<b>Jumlah</b>	<b>12.584.500.000</b>	<b>12.251.019.871</b>	<b>97,35</b>	

3. Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek Ketersediaan :

- Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
- Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi)
- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan

- meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
  - Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
- b. Agar individu atau rumah tangga dapat memiliki akses terhadap pangan, maka pemerintah harus berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen. Rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan antara lain :
- Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien
  - Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan
  - Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan
  - Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat
  - Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) dan penyusunan peta rawan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG).
- c. Dalam rangka meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
- Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
  - Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
  - Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu
  - Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional
  - Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, sosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan
- d. Menambah jenis cadangan pangan nasional, tidak hanya beras, tetapi juga komoditi lainnya seperti bawang, cabe, dan lainnya

# Daftar Isi

## Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	2
D. Program dan Kegiatan Tahun 2017 .....	8
E. Issu Utama Ketahanan Pangan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
A. Visi dan Misi .....	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
C. Kebijakan dan Strategi .....	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	15
E. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	20
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	20
C. Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumbar .....	22
1. Capaian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat .....	22
2. Capaian Kinerja Tingkat Provinsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi.....	74

# Daftar Tabel

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	14
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	16
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tingkat Provinsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	17
Tabel 4	Revisi Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat	18
Tabel 5	Klasifikasi dan Predikat Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	20
Tabel 6	Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	21
Tabel 7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Kualitas Pangan Masyarakat”	23
Tabel 8	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal	25
Tabel 9	Skor PPH Tahun 2017 (angka sementara)	26
Tabel 10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	26
Tabel 11	Angka Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 (Angka Sementara)	28
Tabel 12	Kelompok/Pelaku Pengolahan Pangan Lokal Kabupaten/Kota	29
Tabel 13	Jumlah Sertifikat Prima Yang Telah Diterbitkan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2017	36
Tabel 14	Rekapitulasi Sertifikat Prima yang Telah Diterbitkan Tahun 2017 oleh UPTD-BPSMP Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 15	Rekapitulasi Hasil uji labor dan sertifikat registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Beras)	38
Tabel 16	Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	39
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat”	41
Tabel 18	Ketersediaan Pangan Secara Natura di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (ARAM II Tahun 2017)	43
Tabel 19	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Sumatera Barat Tahun 2017*	44
Tabel 20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein	44
Tabel 21	Ketersediaan Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 (ARAM II)	45
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein	46

Tabel 23	Lokasi Penerima Dana Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2017	50
Tabel 24	Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (penyediaan dan penyalurannya) hingga tahun 2017	43
Tabel 25	Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	55
Tabel 26	Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen	57
Tabel 27	Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan beras dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2017	59
Tabel 28	Coefisien Variasi Harga Beras Tahun 2016-2017	59
Tabel 29	Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2017	60
Tabel 30	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2016 dan 2017	61
Tabel 31	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen (HPP) Tahun 2016 – 2017	62
Tabel 32	Harga rata-rata gabah dan beras KW I dan KW II di tingkat produsen Tahun 2016 – 2017	63
Tabel 33	Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen	67
Tabel 34	Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Tingkat Provinsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	68
Tabel 35	Dukungan Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	69
Tabel 36	Dukungan Anggaran APBN, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	71
Tabel 37	Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan per program pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	71
Tabel 38	Alokasi Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2017	60

# Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

7

# Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Penghargaan-Penghargaan
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Lingkup Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 s/d 2021

# BAB I

## PENDAHULUAN

*BAB I, berisi :*

- a. *Latar Belakang*
- b. *Maksud dan Tujuan*
- c. *Tupoksi Organisasi*
- d. *Program dan Kegiatan*
- e. *Isu Utama Ketahanan Pangan*

### A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (good governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja ini menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Pangan Sumbar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **C. Tugas dan Fungsi**

#### **a) Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kedudukan Dinas Pangan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

#### **b) Tugas**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, pengertian Pangan adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dengan pengertian tersebut, dalam mewujudkan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata diseluruh wilayah Sumatera Barat.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau diartikan pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Untuk mewujudkan maksud dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat mempunyai **tugas pokok** melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Pangan.

### c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai **fungsi** :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
3. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **d) Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pangan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- e. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

Adapun tugas masing-masing bagian diatas, seperti yang termuat dalam Surat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

- a. **Sekretariat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Keuangan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

b. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi Pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Harga Pangan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Pangan
- b. Seksi Harga Pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan

c. **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan
- b. Seksi Sumberdaya Pangan
- c. Seksi Kerawanan Pangan

- d. **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal dan Keamanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keamanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal
- c. Seksi Keamanan Pangan

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTD-BPSMP)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dan Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat No. 521/1601/BKP/2010, tanggal 29 Juni 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Esselon III dan IV dilingkungan UPTD-BPSMP Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Balai.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
- d. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi.

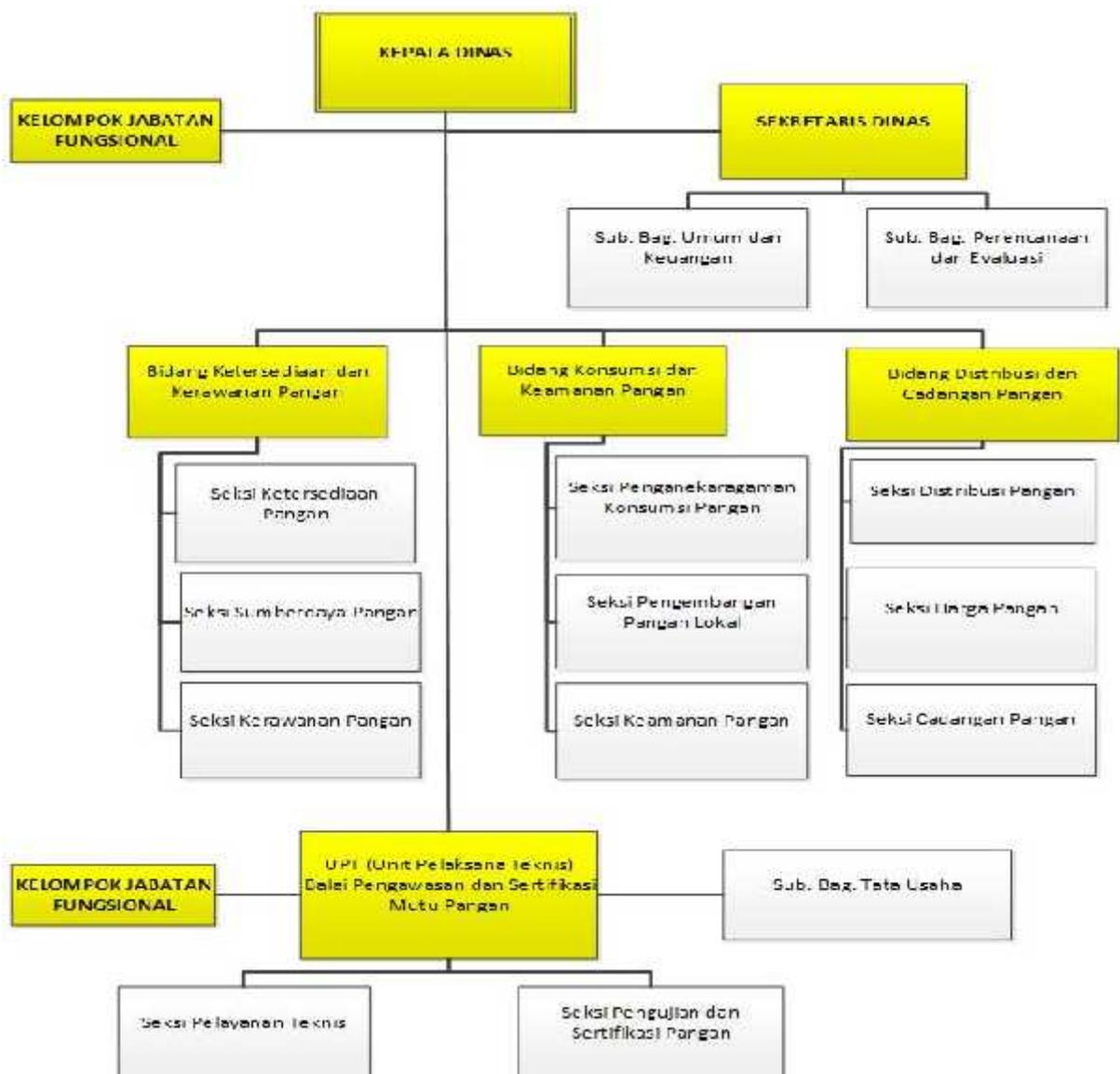
UPTB-BPSMP mempunyai tugas 1). Melaksanakan pengawasan mutu bahan pangan segar baik yang produksi daerah maupun bahan pangan impor, 2). Melaksanakan sertifikasi mutu bahan pangan segar.

Sedangkan fungsi UPTD-BPSMP adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
- b. Pengkajian dan Analisa Teknis Operasional Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.

- c. Pengujian dan persiapan teknologi pengawasan dan sertifikasi mutu pangan dilapangan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan keamanan pangan segar.
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Pengawasan dan sertifikasi mutu pangan
- f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pengawasan dan sertifikasi mutu pangan.
- g. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTB.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



### **D. Program dan Kegiatan Tahun 2017**

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah
2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat Prima)
3. Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
4. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan
5. Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
6. Pemasarakan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikat Prima
7. Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (SD/MTs) Hasil Usaha Rumah Tangga
8. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
9. Analisa Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
10. Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang beredar di Masyarakat
11. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
12. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
13. Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
14. Penyusunan Database Ketahanan Pangan
15. Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan
16. Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah
17. Gerakan Hari Pangan Se Dunia Tingkat Provinsi dan Nasional
18. Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat
19. Surveilen dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen
20. Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
21. Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan

#### **b. Program Diversifikasi Pangan**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi
2. Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal

3. Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP )
4. Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal
5. Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan ( P-KRPL )

Selain itu dalam mencapai target dan sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan di Sumatera Barat, pada tahun 2017 mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi) dari eselon I Dinas Pangan Kementerian Pertanian dengan 1 (satu) program, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, dengan kegiatan berikut :

1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
2. Lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi
3. Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan
4. Kawasan Mandiri Pangan
5. Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan
6. Pemberdayaan Pekarangan Pangan
7. Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar
8. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
9. Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Dinas Pangan

### E. Isu Utama Ketahanan Pangan

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut ;

- 1) Aspek Ketersediaan
  1. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan.
  2. Penyediaan sarana produksi (pupuk an organik) belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pupuk organik belum bisa di andalkan sebagai substitusi pupuk an organik.
  3. masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan.
  4. Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/ sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan
  5. kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang
  6. Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota sebesar 100 ton sejauh ini masih di tingkat provinsi yang memenuhinya, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota masih belum seluruhnya memfasilitasinya

2) Aspek Distribusi Pangan

1. Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan.
2. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
3. belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada kabupaten/kota yang berada pada daerah perbatasan dengan Provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan fluktuasi harga pangan.
4. belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras
5. Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di konsumen
6. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

3) Aspek Konsumsi Pangan

1. Pola Konsumsi masyarakat Sumatera Barat belum mengacu pada Beragam, Bergizi dan Berimbang
2. Belum berkembangnya Teknologi Industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal.
3. Belum berkembangnya pangan alternatif yang berbasis sumberdaya pangan lokal.
4. Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat atas perlunya pangan sehat
6. Ketidakmampuan penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi gizi sehat
7. merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan
8. pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

*BAB II, berisi :*

- a. *Visi, Misi*
- b. *Tujuan dan Sasaran Strategis*
- c. *Kebijakan dan Strategi*
- d. *Perjanjian Kinerja Tahun 2017*
- e. *Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017*

### A. Visi dan Misi

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD baik OPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2017-2021, RPJMD Sumatera Barat disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

#### 1. Visi

Visi Dinas Pangan adalah ;

**“ Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal “.**

Visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat diatas mempunyai makna sebagai berikut:

- Handal : Mengandung makna bahwa mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.
- Kemandirian pangan : Mengandung makna bahwa kemampuan provinsi Sumatera Barat dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
- Sumber daya lokal : Mengandung makna bahwa pangan, baik dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya masyarakat provinsi Sumatera Barat.

## 2. Misi

Guna mewujudkan visi Dinas Pangan Tahun 2016 – 2021 di atas, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- d. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan.

## B. Tujuan dan Sasaran Strategis

### 1. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: :

- a. Misi : *Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal*, dengan tujuan :
  1. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal.
- b. Misi : *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan*, dengan tujuan:

1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan pangan serta antisipasi kerawanan pangan.
- c. Misi : *Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan*, dengan tujuan :
  1. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan utama.
- d. Misi : *Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan*, dengan tujuan :
  1. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur dalam mewujudkan Kemandirian Pangan

## **2. Sasaran**

Mengacu kepada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Misi : *Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal*, dengan sasaran :
  1. Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat.
- b. Misi : *Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan*, dengan sasaran :
  1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.
- c. Misi : *Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan*, dengan sasaran :
  1. Stabilitnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen.
- d. Misi : *Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan*, dengan sasaran :
  1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Satuan	TARGET KINERJA 2017
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	84,6
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2	Ketersediaan Pangan Utama Beras	ton	1.512.953
3	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3	Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)		
			3.1. Beras	%	10
		3.2. Cabe Merah	%	25	
		4	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	HPP	HPP
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	B
		6	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	%	95

### C. Kebijakan dan Strategi

#### 1. Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal.
2. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
3. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
4. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat.
6. Menjaga stabilitas Harga Pangan.
7. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien.
8. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.
9. Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor.
10. Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana

## **2. Strategi**

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut

1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
2. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.
3. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga.
4. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;.
5. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan
6. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Daerah

### **D. Perjanjian Kinerja 2017**

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Sumatera Barat. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi. Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi

komitmen bagi OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapainya dalam Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, Penetapan Kinerja Dinas Pangan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ada 2 (dua), yaitu Penetapan Kinerja OPD Dinas Pangan dan Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2017 ini ditetapkan kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

## 1. PENETAPAN KINERJA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2017
1	Meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,6
		2. Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2.1. Konsumsi Energi (KKal/Kap/Hari) 2.2. Konsumsi Protein (Gram/Kap/Hari)	2.150 57
2	Terpenuhinya ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein	3. Dipertahankannya ketersediaan pangan masyarakat 3.1. Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hari) 3.2. Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	2.400 63
3	Meningkatnya usaha desa mandiri pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan	4. Teratasinya masyarakat rawan pangan (KK)	810
		5. Persentase penanganan Masyarakat rawan pangan pada 32 nagari ( % )	20
4	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	6. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV) 6.1. Beras (%) 6.2. Cabe Merah (%)	10 25
		7. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)	HPP
5	Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat	8. Jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ton)	100
6	Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	9. Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	76

7	Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	10	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	100
8	Meningkatnya daya saing produk pangan segar melalui sertifikasi	11	Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (buah)	10
9	Meningkatnya kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaporan evaluasi kinerja dan sistem keuangan	12	Nilai evaluasi AKIP	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN		
1	Program Diversifikasi Pangan	Rp	1.000.000.000	APBD
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	5.635.000.000	APBD
<b>Jumlah APBD</b>		Rp.	<b>6.635.000.000</b>	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	<b>6.030.500.000</b>	APBN
<b>Jumlah APBD + APBN</b>		Rp	<b>12.665.500.000</b>	

## 2. PENETAPAN KINERJA TINGKAT PROVINSI DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tingkat Provinsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor pola pangan harapan	84,6
No	Program	Anggaran	
1	Diversifikasi Pangan	1.000.000.000	APBD

### E. Revisi Perjanjian Kinerja 2017

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021, maka dilakukan penyesuaian sasaran strategis antara Perjanjian Kinerja dengan Renstra Dinas Pangan. Revisi Perjanjian Kinerja hanya untuk Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Perjanjian Kinerja Provinsi tidak mengalami perubahan. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Revisi Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2017
1	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,6
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2. Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)	1.512.953
3	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV) 3.1. Beras (%) 3.2. Cabe Merah (%)	10 25
		4. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)	HPP
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		6. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Diversifikasi Pangan	Rp 1.000.000.000	APBD
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp 5.635.000.000	APBD
	<b>Jumlah APBD</b>	Rp. <b>6.635.000.000</b>	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. <b>6.030.500.000</b>	APBN
	<b>Jumlah APBD + APBN</b>	Rp <b>12.665.500.000</b>	

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

*BAB III, berisi :*

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja*
- b. Hasil Pengukuran Kinerja*
- c. Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumbar*

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

## **A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 5. Klasifikasi dan Predikat Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	< 53 %	Gagal

## **B. Hasil Pengukuran Kinerja**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan *)	%	84,6	85,3	100,83
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	2 Ketersediaan Pangan Utama Beras	ton	1.512.953	1.512.953	100,00
3	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	3 Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen				
		3.1. Beras (%)	Cefisien Variasi / CV	10	6,135	100,00
		3.2. Cabe Merah (%)	Cefisien Variasi / CV	25	24,82	100,00
		4 Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	HPP	HPP	HPP	100,00
Rata - Rata Capaian						100,17
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
1	Program Diversifikasi Pangan	950.000.000	931.730.839	98,08		
2	Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	5.604.000.000	5.464.642.700	97,51		
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.030.500.000	5.854.646.332	97,08		
Jumlah		14.532.668.000	12.251.019.871	84,30		

Dari tabel diatas, dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, **Hampir keseluruhan indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih**. Rata-rata nilai capaian sebesar 100,17% dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **sangat baik**.

Tingkat keberhasilan ketercapaian ini menunjukkan komitmen dan kerjas keras Dinas Pangan Sumbar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan pengendalian pangan selama tahun 2017.

### C. Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat Tahun 2017

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

#### 1. CAPAIAN KINERJA OPD DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pencapaian kinerja Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang didukung dengan dana APBD melalui belanja langsung urusan dilaksanakan melalui 2 Program, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Diversifikasi Pangan. Sedangkan dukungan APBN melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam hal pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang akan dijelaskan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

### Sasaran 1 :

## Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

**Meningkatkan Kualitas Pangan Masyarakat** adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganeekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengertian penganeekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. **Pertama, penganeekaragaman horizontal**, yaitu upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan dan upaya meningkatkan



produksi dari masing-masing komoditas tersebut. Sebagai contoh, pengaturan komposisi makanan sehari-hari kita di samping beras, juga umbi-umbian, sagu, kacang-kacangan, ikan, sayur, buah dan lain-lainnya. **Kedua, *penganekaragaman vertikal***, yaitu upaya untuk mengolah komoditas pangan, terutama non beras, sehingga mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi, nutrisi maupun sosial. Misalnya mengolah jagung menjadi "corn flake", ubi kayu diolah menjadi berbagai macam makanan, baik makanan pokok, maupun jajanan, seperti misalnya kripik ("cassava chips").

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas pangan masyarakat" ini terdapat 1 indikator seperti pada tabel berikut.

Tabel 7 . Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	1 Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) *)  Rata-rata Capaian	%	84,6	85,3	100,83  100,83

*Ket. : \*) Angka Sementara Tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pangan masyarakat" adalah sebesar 100,83 %. Artinya bahwa target indikator Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercapai. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

## Indikator Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam

keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan.

Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun yang disertai dengan menurunnya produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menyebabkan status gizi kurang dan gizi buruk. Apabila tidak ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang mencukupi, pada akhirnya tubuh akan mudah terserang penyakit infeksi yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yg seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola pangan harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*), cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideal dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 100 seperti yang terlihat pada tabel berikut ;

**Tabel 8 : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal**

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal
1.	Padi-padian (beras jagung, terigu)	25
2.	Umbi-umbian (singkong, ubi jalar, talas, sagu, kentang, dll)	2,5
3.	Pangan hewani (daging sapi, daging kambing, ayam, dll)	24
4.	Minyak dan lemak (minyak goreng, gajeboh)	5
5.	Buah/biji berminyak (kelapa, kemiri)	1
6.	Kacang-kacangan (tempe, tahu, oncom, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dll)	10
7.	Gula (gula pasir, gula merah)	2,5
8.	Sayur dan buah	30
9.	Lain-lain (minuman dan bumbu-bumbuan)	0
<b>Total</b>		<b>100</b>

Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui olahan beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kkal/kap/hari)}}{2000 \text{ kkal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = (\% \text{ AKE} \times \text{ bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH merupakan perbandingan antara Skor PPH maksimal dengan Skor AKE, dimana jika skor AKE  $\geq$  Skor PPH Maksimal, maka skor PPH yang digunakan adalah Skor PPH Maksimal, namun jika skor AKE < Skor PPH Maksimal maka Skor PPH yang digunakan adalah Skor AKE

Skor PPH penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 \*) Angka sementara dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 9 : Skor PPH Tahun 2017 (angka sementara)**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari) Tahun 2017*	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.417	59,1	70,9	0,5	29,6	35,4	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	40	1,7	2,0	0,5	0,8	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	212	8,8	10,6	2,0	17,7	21,2	24,0	21,2
4	Minyak dan Lemak	317	13,3	15,9	0,5	6,6	7,9	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	122	5,1	6,1	0,5	2,5	3,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	52	2,2	2,6	2,0	4,3	5,2	10,0	5,2
7	Gula	102	4,2	5,1	0,5	2,1	2,5	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	98	4,1	4,9	5,0	20,4	24,4	30,0	24,4
9	Lain-lain	37	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2.395,9						100,0	85,3

Ket: Data Olahan Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat  
\*) Angka Sementara Tahun 2017

Berdasarkan olahan data Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, angka PPH tahun 2017 (angka sementara) adalah sebesar 85,3. Skor PPH yang melebihi skor maks adalah kelompok konsumsi padi-padian, minyak dan lemak, serta buah / biji berminyak. Sedangkan yang jauh berada dibawah skor maks adalah kelompok konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan sayur dan buah. Hal ini menunjukkan bahwa Pola Pangan Harapan (PPH) belum beragam dengan sumbangan terbesar dari kelompok padi-padian. Penduduk Sumbar sudah seharusnya meningkatkan penganekaragaman / diversifikasi pangan misalnya dengan mengurangi pola makan mengkonsumsi padi-padian (dalam hal ini beras yang lebih mendominasi) dan berdiversifikasi ke kelompok umbi-umbian, serta lebih meningkatkan konsumsi pangan hewani dan sayur-sayuran.

Jika dibandingkan dengan target PPH tahun 2017 (RPJMD 2016 – 2021), skor PPH penduduk Sumatera Barat sudah melebihi dari target tetapi masih jauh dari target PPH ideal (target nasional) sebesar 100. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 100,83 %. Pencapaian ini termasuk kategori **Sangat Baik**.

**Tabel 10 : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat**

URAIAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					% CAPAIAN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	%	76	77	78	84	84,6	84,4	83,7	83,8	84,3	85,3	111,05	108,70	107,44	100,36	100,83

Untuk mendukung capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat”, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan hal-hal berikut :

### **a. Pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)**

Jargon konsumsi pangan “4 sehat 5 sempurna” saat ini sudah beralih ke konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Pangan yang B2SA adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protrein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan aman bagi tubuh. Perlunya pangan yang B2SA ini adalah dikarenakan tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu manusia membutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dari berbagai jenis makanan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Pangan B2SA memenuhi Triguna Makanan, yaitu sebagai sumber tenaga, sumber zat pembangun (pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan tubuh) dan sebagai sumber zat pengatur (meningkatkan dan menjaga kebugaran tubuh). Sebagai sumber tenaga zat gizi yang dibutuhkan adalah karbohidrat dan kandungan karbohidart terdapat dalam kelompok makanan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak serta gula. sebagai zat pembangun dibutuhkan zat gizi protein, dan kandungan protein terdapat dalam pangan hewani dan kacang-kacangan. Sedangkan sumberzat pengatur terdapat dalam zat gizi vitamin dan mineral, dan kandungan vitamin dan mineral terdapat dalam kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan.

Indikator Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ini terdiri dari 2 (dua) sub indikator, sebagai berikut **konsumsi energi** dan **konsumsi protein**. Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merumuskan bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata pada tingkat konsumsi adalah sebesar **2.000 Kkal/kap/hari**. Untuk angka konsumsi protein menurut WNPG adalah sebesar **52 gram/kap/hari**. Angka tersebut juga dijadikan target konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2017. Angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat tahun 2017 (angka sementara) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 : Angka Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 (Angka Sementara)

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr)	Konsums Protein (Gram/kap/hr)	Target Konsumsi Pangan s/d 2020 (Kkal/kap/hr)
		2017*)	2017*)	
1	Padi - Padian	1.417	31,8	1.000
2	Umbi - Umbian	40	0,6	120
3	Pangan Hewani	212	20,1	240
4	Minyak & Lemak	317	0,0	200
5	Buah/ Biji Berminyak	122	1,2	60
6	Kacang - Kacangan	52	5,2	100
7	Gula	102	0,0	100
8	Sayur dan Buah	98	3,5	120
9	Lain - lain	37	1,6	60
<b>Total</b>		<b>2.396</b>	<b>64</b>	<b>2.000</b>

Ctt. \*) Angka Sementara 2017

Berdasarkan tabel di atas, angka konsumsi energi penduduk Sumatera Barat tahun 2017 (angka sementara) adalah sebesar 2.396 Kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein sebesar 64 gram/kapita/hari. Dibandingkan dengan target konsumsi energi Nasional (2.000 Kkal/kapita/hari), angka konsumsi energi penduduk Sumatera Barat tahun 2017 lebih besar dari target. Capaian konsumsi energi tahun 2017 sebesar 119,8 % dan konsumsi protein 123,08 % dengan rata-rata capaian tahun 2017 sebesar 181,34 %. Penyumbang konsumsi energi terbesar berada pada kelompok pangan padi-padian dan minyak dan lemak. Sedangkan umbi-umbian dan sayur dan buah berada jauh dibawah target nasional. Artinya konsumsi penduduk Sumatera Barat masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras. Konsumsi buah dan biji berminyak penduduk Sumatera Barat juga sangat tinggi, hal ini disebabkan karena penduduk Sumatera Barat suka mengkonsumsi makanan bersantan yang menyebabkan banyak penyakit. Oleh karena itu disarankan agar penduduk Sumatera Barat dapat mengurangi konsumsi buah / biji berminyak dan meningkatkan penganekaragaman konsumsi karbohidrat jenis padi-padian, seperti meningkatkan konsumsi umbi-umbian. Penganekaragaman konsumsi karbohidrat ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap padi-padian yang semakin lama semakin terbatas jumlahnya karena masalah lahan dan gangguan bencana.



## **b. Pengembangan Pangan Lokal**

Pangan lokal adalah pangan tradisional yang dihasilkan dari suatu daerah di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam makanan olahan baik makanan pokok, maupun makanan tambahan diperlukan adanya pengembangan terhadap pangan lokal untuk meningkatkan kualitas, gizi, sehingga mampu bersaing dengan pangan modern yang saat ini sudah banyak dijumpai dikalangan masyarakat.

Salah satu upaya dalam pengembangan konsumsi pangan dilaksanakan melalui pengembangan pangan lokal, karena pangan lokal merupakan pangan yang sudah dikenal, mudah diperoleh disuatu wilayah, jenisnya beragam dan dapat diusahakan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Dengan demikian, pengembangan pangan lokal diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan yang beragam ditingkat rumah tangga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada tahun 2017, Dinas Pangan Provinsi Sumatera telah melakukan pembinaan ke 58 kelompok pangan lokal di 19 kabupaten/kota. Diharapkan dengan adanya pengembangan pangan lokal ini, dapat mendukung diversifikasi pangan lokal di Sumatera Barat baik meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas produk pangan lokal. Kelompok Pengolahan Pangan Lokal yang ada di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :

**Tabel 12. Kelompok/Pelaku Pengolahan Pangan Lokal Kabupaten/Kota**

NO.	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	LOKASI
	<b>KOTA</b>		
1.	Bukittinggi	Arai Pinang	Jl. Sudirman No. 42 Bukittinggi
		Mayang Sari V	Jl. Kusuma Bhakti Gang Aster
		UP3HP Bunda Kreatif	Jl. Angku Basa No. 29 C Tarok
		UP3HP Pulai Jaya	Jl. Wisma Ganting Permai Pulai Anak Air
2.	Padang	UP3HP Karya Bersama	Kel. Korong Gadang, Kecamatan Kuranji
		Tanamo Coklat	Simpang Adabiah No. 2
		UP3HP Bunga Mas Berkah	Padang

NO.	KAB/KOTA	NAMA KELOMPOK	LOKASI
3	Payakumbuh	KWT Markinis	Jl. Dr. Ir. Sutami Sicincin Payakumbuh Timur
		KWT Sumber Rezeki	Kec. Koto Tangah Payakumbuh Barat
		KWT Lurah Taluak	Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan
		KWT Bundo Mudo	Kel. Balai Tengah Koto RW 2
4	Sawahlunto	Tunas Muda LOBANA	Desa Muara Kalaban
		KWT Anggrek	Desa Salak Kelurahan Talawai
5	Pariaman	Anggrek Bulan	Dusun Selatan Desa Kp. Baru Kec. Pariaman Tengah
		KWT Hijau Berseri	Jl. M. Yamin No. 17 Kel. Taratak Kec. Pariaman Tengah
6	Solok	Aneka Kue Arden	RT 03/RW 01 Pasar Pandan Air Mati
		Cindy Snack	Gurun nagari
7.	Padang Panjang	Ambun Pagi II	Jl. Syeh Sulaiman Arasuli RT X Kel. Ekor Lubuk Padang Panjang Timur
		KWT Seruni	Jl. Adam BB No. 25 TR 15 Balai - balai
	<b>KABUPATEN</b>		
8.	Solok	Kel. Hidayah	
		Karya Sari Wanita	Nag. Koto gadang Guguak Kec. Gn. Talang
		Kelapa Gonseng Ubi	B. Tandang Bukit Sundi
		Roza Nita	Kampung markis Nagari Gantung Ciri Kec. Kubung
9.	Solok Selatan	KWT Kamboja	Jr. Koto Kaciak Nag. Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu
		KWT Gender Sungai Langkitang	Jr. Sungai Lingkitang Kec. Sangir
		UP3HP Melati	
		Karya Wanita	Jl. Sepandia Angek Nagari Pekan Kec. KPGD

<b>NO.</b>	<b>KOTA</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>LOKASI</b>
10	Pasaman Barat	KWT Srikandi	Sumber Agung Kecamatan Kinali
		KWT Pertiwi	Translop Jrg. Timba Abu Nag. Kajai Kec. Talamau
		Dahlia IVA	Kinali
		Bahagia Bersama	Tanjung pangka Kec. Pasaman
11	Pesisir Selatan	KWT Taman Sayur	Kampung Sungai Limau Nag. Sungai Sarik Kec. Silaut
		Novelda	Jinang Kampung Pantur Kec. Koto XI Tarusan
		Anggrek Culinary Creation	Carocok Painan
12	Tanah Datar	KWT Sukses Mandiri Lintau	Jrg Kota Tepi Sel
		Baringin Sati Rambatan	Jorong Rambatan Nagari Rambatan Kec. Rambatan
		Fajar Baru	Nagari Parambahan Kec. Lima Kaum
		Kamboja Indah	Nagari Lubuk jantan Kec. Lintau Buo Utara
13	Pasaman	KWT Permata Bunda	Jl. Kampung Sipisang No.5 D Jrg. Guguak Salareh Aia Nagari Alahan Mati Kec. Simpang Alahan Mati
		KWT Harapan Baru	Simpang Utara Kec. Simpatsi
14	Lima Puluh Kota	Kerupuk Ubi Singkong	Sarilamak Kec. Harau
		Keripik Singkong	Jorong Kapalo Koto Nagari Koto tengah Simalanggang
		Sehati	Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh
		Senada	Kapalo Bukik Lareh Sago Halaban Nagari Batu Payuang

<b>NO.</b>	<b>KOTA</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>LOKASI</b>
15	Agam	KWT UP3HP Kaliwari	Kamang Hilir Kec. Kamang Magek
		Kelompok kerupuk Pitaruah Mandesh	Jorong Ladang Tibaralu Kenagaraan Koto Tengah
		Pusako Bundo	Nag. Parit Panjang Jorong Parit Panjang Kecamatan matur
		KWT Anggrek	Kec. Tanjung Raya
16	Padang Pariaman	Dewi Fortuna	Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau
		KWT Kebersamaan	Nagari Lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai Sarik
		KWT Mekar Sari	Sicincin Padang Pariaman
		KWT Aur	Lubuk Alung Padang Pariaman
17	Sijunjung	KWT Mandiri	Jorong Batu Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII
		KWT Ranah Minang	Jorong Padang ranah Nagari Sijunjung
		KWT Serba Guna	Pamatang Sijunjung
18	Dharmasraya	KWT Sehati	Jrg Lagan jaya I Nagari Sipangkur Kec. Tiumang
		Tani Sadar	Jr. Parik Taratk Nag. Sikabau Kec. Pulau Punjung
			Jr. Pulau Punjung Nag. IV Koto Kec. Pulau Punjung

### c. Pangan beredar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat



Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari luar provinsi belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin, dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah / tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.

Diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Sumatera Barat dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan segar. Dalam hal ini dilakukan pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat (pasar dan swalayan) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat.

Tahun 2017 penanganan keamanan pangan segar dilakukan terhadap 58 sampel yang diambil dari beberapa lokasi di Sumatera Barat yang terdiri dari 48 sampel sayur (bawang merah 12 sampel, cabe merah 12 sampel, tomat 12 sampel dan seledri 12 sampel) dan 10 sampel ikan. Dari 48 sampel sayur yang diambil dan sudah dilakukan uji laboratorium 35 sampel terdeteksi residu pestisida (bawang merah 6 sampel, cabe merah 12 sampel, tomat 10 sampel dan seledri 7 sampel), namun kandungan residu pestisida tersebut masih dibawah batas maksimal yang diperbolehkan (BMR). sedangkan ikan kering tidak terdeteksi formalin. Tingkat keamanan pangan segar yang diambil sampelnya ini adalah sebesar 100 %. Hasil perolehan ini didapat dari rumusan:

Berdasarkan hasil uji residu pestisida pada sayur sebanyak

$$\% \text{ penanganan keamanan pangan segar} = \frac{\text{Jumlah sampel bahan pangan yang aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang}}{\text{jumlah total sampel yang diambil}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ penanganan} &= \frac{58}{58} \times 100\% \\ \text{keamanan pangan} & \\ \text{segar tahun 2017} & \\ &= 100\% \end{aligned}$$

#### d. Ketersediaan produk pangan segar yang bermutu (memiliki sertifikat dan nomor register) di masyarakat

Keamanan pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan yang dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan yang juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan.

##### ➤ Sertifikat Prima

Sertifikat prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3). Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Prima Satu (P-1) merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah terhadap lingkungan. Prima Dua (P-2) yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik. Sedangkan

Prima Tiga (P-3) adalah penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman di konsumsi.

Pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan



Pusat (OKKPP). Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pertanian merupakan pengakuan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Sertifikasi Prima Tiga atau Prima Dua dikeluarkan oleh OKKPD, sedangkan sertifikasi Prima Satu dikeluarkan oleh OKKPP.

Tahun 2006 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai instansi yang berwenang (otoritas kompetensi) dalam menangani pengawasan keamanan pangan segar dengan SK Gubernur No. 520-329-2006. Selanjutnya sebagai pemegang otoritas pengawasan keamanan pangan segar telah dilakukan kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk koordinasi dengan aparat terkait Provinsi, Kabupaten/Kota, peningkatan SDM petugas dan masyarakat tentang keamanan pangan, Identifikasi dan Sosialisasi dalam rangka mempersiapkan bahan pengawasan lebih lanjut oleh Tim Pengawasan Keamanan Pangan Segar Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2009 melalui Perda No. 3/2008 yang disempurnakan dengan Perda No. 7/2009 dan ditindaklanjuti dengan Pergub No. 66/2009, dimana menetapkan bahwa pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi mutu pangan segar di Sumatera Barat.

Dengan ditetapkannya OKKPD sebagai unit kerja yang melakukan pengawasan keamanan pangan hasil pertanian diharapkan mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan mutu dan keamanan pangan, sehingga operasional pengawasan akan berjalan secara efektif.

Tahapan penerbitan sertifikat prima 3 adalah melalui identifikasi, audit lapangan, audit lanjutan, tinjauan komisi teknis serta rapat komisi teknis untuk memutuskan Kebun / komoditi Pelaku Usaha Agribisnis (PUA) yang berhak mendapatkan sertifikat Prima 3.

Jumlah sertifikat prima yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 : Jumlah Sertifikat Prima Yang Telah Diterbitkan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2017

URAIAN	SATUAN	2011 - 2015	2016	2017
Sertifikasi keamanan pangan segar (sertifikat prima)	sertifikat	169	30	114

Berdasarkan tabel di atas jumlah Sertifikat Prima yang telah diterbitkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2011 hingga 2017 adalah sebanyak 313 sertifikat.

Pada tahun 2017 telah diterbitkan sebanyak 114 sertifikat, dimana 109 sertifikat prima melalui dana APBD dan 5 sertifikat prima melalui dana APBN. Rekapitulasi sertifikat prima yang telah diterbitkan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 : Rekapitulasi Sertifikat Prima yang Telah Diterbitkan Tahun 2017 oleh UPTD-BPSMP Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten	Komoditi	Jumlah
<b>APBD</b>			<b>109</b>
1.	Kab. Solok Selatan	Jeruk	13
2.	Kab. Tanah Datar	Jeruk	7
		Jeruk Keprok	1
		Sawo	8
3.	Kab. 50 Kota	Jeruk	29
4.	Kab. Solok	Durian	1
5.	Kab. A g a m	Sayuran	28
		Jeruk	7
		Strowberi	1
6	Pasaman Barat	Jeruk	13
7	Dharmasraya	Salak	1
<b>APBN</b>			<b>5</b>
	Kab. Agam	Cabai Merah	3
		Bawang Daun	1
		Kacang Buncis	1
<b>TOTAL</b>			<b>114</b>

Pada tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 30 sertifikat prima, dan berdasarkan target yang telah ditetapkan sudah tercapai 100 %. Sertifikat prima yang diterbitkan tahun 2016 ini untuk komoditi 10 kebun jeruk di Kabupaten Pesisir Selatan, 6 kebun jeruk di Kabupaten Limapuluh Kota, 4 kebun jeruk di Kabupaten Solok Selatan, 5 kebun jeruk Kabupaten Tanah Datar dan 5 kebun sayuran di Kabupaten Agam.

Pada tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 42 sertifikat diantaranya 21 sertifikat untuk komoditi jeruk siam, dan 10 sertifikat untuk komoditi pepaya dan 1 sertifikat untuk komoditi cabe. Pada tahun 2015 juga dilakukan pemeringkatan sertifikat prima 2 untuk komoditi jeruk siam sebanyak 3 sertifikat. Selain itu juga dianggarkan dengan dana APBN sebanyak 7 sertifikat prima 3 komoditi manggis.

Pada Tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 30 sertifikat untuk komoditi Jeruk Siam sebanyak 20 sertifikat, komoditi wortel sebanyak 4 sertifikat, komoditi bawang daun sebanyak 2 sertifikat, komoditi cabe merah sebanyak 2 sertifikat, komoditi terung sebanyak 1 sertifikat dan komoditi kol bunga 1 sertifikat. Selain itu ada 4 sertifikat prima 3 yang diperpanjang untuk komoditi Jeruk Siam. Pada tahun 2011 s/d 2013 diterbitkan masing-masing sebanyak 7 sertifikat (2011), 30 sertifikat (2012) dan 60 sertifikat (2013).

### ➤ **Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**

Pada tahun 2017 ini selain kegiatan penerbitan sertifikat prima juga dilaksanakan kegiatan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Kegiatan ini berupa pemberian nomor registrasi terhadap perusahaan Rice Milling Unit (RMU) yang melaksanakan kegiatan penggilingan padi nantinya dipasarkan dalam bentuk beras kemasan. Sebelum nomor registrasi dikeluarkan oleh OKKPD Provinsi Sumatera Barat, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan audit/penilaian terhadap RMU dari pelaku usaha tersebut apakah layak dikeluarkan nomor register atau tidak serta dilanjutkan dengan uji laboratorium di Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang dengan jenis uji logam. Pengujiannya dilakukan melihat sejauh mana tingkat cemaran logam berat terjadi pada produk beras Dari audit/penilaian yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pemohon PSAT, ternyata 10 (sepuluh) pemohon tersebut dapat diterbitkan nomor registrasinya dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. Rekapitulasi Hasil uji labor dan sertifikat registrasi PSAT dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 15 : Rekapitulasi Hasil uji labor dan sertifikat registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Beras)**

No	Pelaku Usaha	Produk	Hasil Uji					Keterangan
			Hg	Zn	Pb	Cu	Cd	
1	Muhammad Arman Nawi (CV.Liberty)	- Cisokan	V	V	V	V	V	Aman
		- Batang Paiman	V	V	V	V	V	Aman
		- Anak Daro	V	V	V	V	V	Aman
2	Rosnayati (Gapoktan Mawar)	- Anak Daro	V*	V	V	V	V*	Sangat Aman
3	Zulmainiar (Gapoktan Saiyo)	- Anak Daro	V*	V	V	V*	V*	Sangat Aman
		- IR	V*	V	V	V*	V*	Sangat Amat
4	Nelidawati Gapoktan Tabek Parayunan	- Junjung	V	V	V	V	V	Aman
		- Banang Pulau	V	V	V	V	V	Aman
5	Dewi Zetriani Kelompok Tani Tarok Sakato	- Junjung	V	V	V	V	V	Aman
6	Zetra Edison (Gapoktan Limo Jurai Ampang Gadang)	- Kusut Putih	V*	V	V	V	V	Sangat Aman
<p>AMBANG BATAS CEMARAN LOGAM BERAT</p> <p>Hg = 0,05 mg/kg</p> <p>Zn= 40 mg/Kg</p> <p>Pb = 1,0 mg/Kg</p> <p>Cu=10 mg/Kg</p> <p>Cd = 0,4 mg/Kg</p>								

Dari tabel diatas terlihat bahwa cemaran logam berat pada beras hasil uji laboratorium masih di bawah ambang batas, sehingga registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Beras) dapat diterbitkan.

Dengan diterbitkannya Sertifikat Prima dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan oleh OKKP-D Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan pangan segar asal Sumatera Barat bermutu dan aman untuk dikonsumsi masyarakat, terlebih lagi untuk memasuki pasar bebas Asean (MEA) karena sudah bersertifikat.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
2. Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
3. Mendorong peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu
4. Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional
5. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, sosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan

Guna mendukung pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan APBD dan APBN sebagai berikut :

**Tabel 16. Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat</b>	<b>4.535.500.000</b>	<b>4.473.223.742</b>	<b>98,63</b>
<b>APBD</b>	<b>1.905.000.000</b>	<b>1.873.531.339</b>	<b>98,35</b>
<b>I PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>955.000.000</b>	<b>941.800.500</b>	<b>98,62</b>
1 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar ( Sertifikasi Prima )	400.000.000	397.450.600	99,36
2 Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikat Prima	40.000.000	38.923.600	97,31
3 Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamaan Pangan Jajanan Anak Sekolah ( SD/MI )	40.000.000	39.527.500	98,82
4 Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang beredar di Masyarakat	200.000.000	196.104.000	98,05
5 Gerakan Hari Pangan Se Dunia Tingkat Provinsi dan Nasional	200.000.000	197.154.800	98,58
6 Surveilen dan Pengawasan Pangan Segar Tingat Produsen	75.000.000	72.640.000	96,85
<b>VI PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN</b>	<b>950.000.000</b>	<b>931.730.839</b>	<b>98,08</b>
1 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi	130.000.000	125.652.439	96,66
2 Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal	350.000.000	343.657.200	98,19
3 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP )	140.000.000	139.239.600	99,46
4 Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal	100.000.000	97.550.000	97,55
5 Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan ( P-KRPL )	230.000.000	225.631.600	98,10
<b>APBN</b>	<b>2.630.500.000</b>	<b>2.599.692.403</b>	<b>98,83</b>
1 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.215.500.000	2.188.176.500	98,77
2 Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	220.000.000	217.312.800	98,78
3 Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	195.000.000	194.203.103	99,59

## **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**

**K**etahanan pangan adalah hal yang paling strategis bagi suatu Negara, karena pangan adalah hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Bahkan hak pangan sendiri telah diundang undang sebagai hak asasi manusia dalam *Declaration of Human Right*. Berdasarkan UU Pangan 2012 dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



Ketahanan Pangan suatu daerah dapat digambarkan bagaimana daerah tersebut mampu memenuhi ketersediaan pangan secara fisik dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Sedangkan produksi pangan tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman pangan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan

pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Ketersediaan pangan utama (beras)	Ton	1.512.953	1.512.953	100

*Ket. : \*) Angka Ramalan II Tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” adalah sebesar 100 %. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Ketersediaan pangan utama beras. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

## Indikator Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Situasi ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi masyarakat secara agregat dapat diketahui dengan menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*), dan penggunaan pangan (*food utilization*), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (*volume*) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram per kapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita perhari yang dinyatakan dalam satuan Kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energi) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan dalam penyusunan NBM, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah

dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. OPD yang terlibat antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Bulog lingkup Sumatera Barat.

Dalam tabel NBM, bahan makanan menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 11 kelompok, yaitu padi-padian, makanan berpati, gula, buah / biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan dan minyak dan lemak. Penghitungan konsumsi energi dan protein menggunakan aplikasi / software NBM. Penghitungan untuk tahun 2017 menggunakan angka Ramalan II (ARAM II), tahun 2016 menggunakan Angka Tetap (ATAP) dan 2018 menggunakan angka Proyeksi. Rumus penghitungan angka konsumsi energi dan protein penduduk Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Angka ketersediaan energi penduduk Sumatera Barat	=	ketersediaan bahan pangan perkapita perhari x kandungan kalori
Angka ketersediaan protein penduduk Sumatera Barat	=	ketersediaan bahan pangan perkapita perhari x kandungan protein

Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Besarnya ketersediaan pangan di Sumatera Barat dalam bentuk **natura** dari tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 18.**

Ketersediaan Pangan Secara Natura di Provinsi Sumatera Barat  
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (ARAM II TAHUN 2017)

No.	Komoditi	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Konsumsi (kg/kap/th)	Kebutuhan (Ton)	+/-
1	2	3	4	5	6	7 = 4 - 6
<b>A Pangan Nabati</b>						
1	Padi	2.773.478				
	Beras		1.512.953	118,1	628.468	884.485
2	Jagung	1.016.821	1.754	0,3	1.596	157
3	Kedelai	78	36.192	6,8	36.186	6
4	Ubi kayu	228.446	37.189	4,4	23.415	13.774
5	Ubi jalar	130.286	15.239	1,6	8.514	6.725
6	Kacang tanah	5.605	1.613	0,3	1.596	17
7	Kacang hijau	312	11	0,0	-	11
8	Sayur-sayuran	634.149	413.048	59,2	315.032	98.016
	Cabe	110.721	50.667	8,7	46.061	4.606
	Bawang merah	86.541	25.883	4,4	23.530	2.353
9	Buah-buahan	588.079	229.718	31,2	166.030	63.687
<b>B Pangan Hewani</b>						
10	Daging	45.416	65.503	10,1	53.747	11.756
11	Telur	75.214	49.106	8,1	43.104	6.002
12	Susu	1.458	13.053	2,3	12.239	813
13	Ikan	454.956	292.490	23,0	122.394	170.095

Jumlah penduduk 5.321.489 Jiwa  
 Kebutuhan penduduk dihitung berdasarkan data konsumsi Susenas 2016 (BPS diolah dan di justifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP-Kementan RI)  
 - Kebutuhan pangan lainnya yang tidak tersedia data konsumsinya pada Susenas 2016, bersumber dari Data Pola Konsumsi Makanan Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2015-2016 (BPS Provinsi Sumatera Barat)  
 - Data impor dan ekspor bahan makanan tahun 2016 diasumsikan hampir sama dengan data 2015 yaitu data JTO dan data keluar masuk bahan pangan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang (darat, udara dan laut)

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh komoditi pangan diperkirakan berada pada kondisi surplus. Bila ditinjau dari sisi produksi, maka komoditi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau akan mengalami kondisi minus bilamana produksi tidak ditingkatkan dan impor tidak mencukupi. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 (5.321.489 jiwa), ketersediaan pangan perkapita pertahun yang dikonsumsi penduduk Sumatera Barat pada tahun 2017 (Angka Ramalan II) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19.

Ketersediaan Pangan Untuk Dikonsumsi Penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 *)				
No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/kapita/tahun)	Konsumsi Pangan (Kg/kapita/tahun)	Keterangan (+/-)
1	Padi-Padian	284,64	131,30	153,34
2	Makanan Berpati	10,14	7,30	2,84
3	Gula	11,36	10,20	1,16
4	Buah Biji Berminyak	33,64	15,70	17,94
5	Buah-Buahan	43,17	31,20	11,97
6	Sayur-sayuran	77,62	59,20	18,42
	Cabe	9,52	8,66	0,87
	Bawang Merah	4,86	4,42	0,44
7	Daging	12,31	10,10	2,21
8	Telur	9,23	8,10	1,13
9	Susu	2,45	2,30	0,15
10	Ikan	14,24	13,20	1,04
11	Minyak dan Lemak	54,96	23,00	31,96

Sumber : Diolah oleh Dinas Pangan Sumbar

Keterangan : \*) angka Ramalan II

Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2016 – 2017 maka capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein

URAIAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		%CAPAIAN	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	1.495.021	1.512.953	1.495.356	1.512.953	100,02	100,00

Untuk mendukung capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat”, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan hal-hal berikut :

### a. Ketersediaan Pangan Minimal

Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan/komoditi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya. Untuk melihat ketersediaan energi penduduk Sumatera Barat dilakukan dengan mengkonfersikan ketersediaan bahan pangan dengan kandungan kalorinya. Sedangkan ketersediaan protein dengan mengkonfersikannya dengan kandungan

proteinnya. Didalam sedangkan ketersediaan protein dalam satuan gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein tahun 2017 (ARAM II) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 21. Ketersediaan Energi dan Protein Penduduk Sumatera Barat Tahun 2017 (ARAM II)**

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (Gram/kapita/hari)
<b>A</b>	<b>Pangan Nabati</b>	<b>3.649</b>	<b>79,65</b>
1	Padi-padian	2.824	66,12
2	Makanan berpati	30	0,21
3	Gula	113	0,03
4	Buah biji berminyak	213	9,05
5	Buah-buahan	53	0,95
6	Sayur-sayuran	64	3,29
7	Minyak dan lemak	351	0,01
<b>B</b>	<b>Pangan Hewani</b>	<b>238</b>	<b>29,64</b>
8	Daging	84	6,05
9	Telur	32	2,49
10	Susu	4	0,22
11	Ikan	118	20,88
	<b>Jumlah</b>	<b>3.888</b>	<b>109,29</b>

Sumber : Data olahan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : \*) angka ramalan II

Dari tabel diatas, tahun 2017 (ARAM II) ketersediaan energi penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 3.888 Kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 109,29 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein terbesar berasal dari pangan nabati. Ketersediaan energi yang berasal dari pangan nabati berjumlah 3.649 kkal/kapita/hari, sedangkan yang berasal dari pangan hewani 238 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi terbesar disumbangkan oleh kelompok pangan padi-padian sebesar 2.824 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein yang berasal dari pangan nabati sebesar 79,65 gram/kapita/hari dan yang berasal dari pangan hewani 29,64 gram/kapita/hari.



Ketersediaan energi dan protein pada tahun 2017 (ARAM II) telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh WNPg X /2012 (menjadi target Nasional). AKG (Angka Kecukupan Gizi) tingkat ketersediaan untuk energi 2.400 Kkal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari.



Ketersediaan pangan baik dari segi natura maupun dari segi nilai gizinya melebihi target yang telah ditetapkan / disarankan oleh WNPG menunjukkan bahwa Sumatera Barat aman dan tidak kekurangan dari segi ketersediaan bahan pangan, meskipun ada tingkat produksinya kecil, tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Sumbar misalnya dengan mendatangkannya dari luar Sumbar.

Jika dibandingkan dengan target dari tahun 2013 – 2017 maka capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Mempertahankan Ketersediaan Minimal Terhadap Energi dan Protein**

URAIAN	SATUAN	TARGET					REALISASI					%CAPAIAN				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017*)	2013	2014	2015	2016	2017
1.1. Ketersediaan Energi *)	KKal/Kap/Hari	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	5.799	3.533	3.649	3.887	3.888	241,63	147,21	152,04	161,96	162,00
1.2. Ketersediaan Protein *)	Gram/Kap/Hari	63	63	63	63	63	134,41	89,57	92,10	109,52	109,29	213,35	142,17	146,19	173,84	173,48
*) Angka Ramalan II Tahun 2017																

Dilihat dari tabel di atas, capaian ketersediaan energi penduduk Sumbar meningkat secara signifikan pada tahun 2013 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2014 dan stabil kembali pada tahun 2015 dan 2017. Terjadinya fluktuasi tersebut dikarenakan bukan berkurangnya tingkat ketersediaan bahan pangan di Sumatera Barat, akan tetapi terdapatnya kesalahan dalam penempatan bahan makanan dalam pengolahan tabel NBM pada tahun 2013 yang berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan energi dan protein. Diharapkan penghitungan di tahun-tahun selanjutnya dilakukan pengelompokan bahan makanan secara tepat sehingga hasil capaian lebih akurat.

## **b. Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan**

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.



Disamping itu, kerawanan pangan juga dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Aspek produksi rawan pangan adalah suatu kondisi dimana kemampuan produksi pangan masyarakat, tidak seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan di daerah itu. Dalam hal ini aspek produksi hanya dilihat dari sisi kemampuan produksinya saja, bukan dari sisi ketersediaan, karena faktor ketersediaan ini bisa dipenuhi oleh adanya pasokan antar wilayah. Aspek konsumsi berkaitan dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan karena daya beli masyarakat sangat rendah (akibat kemiskinan). Aspek distribusi ini menyangkut ketidak seimbangan supply dalam memenuhi demand masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai. Bahan pangan dalam konteks ini tidak hanya berarti beras sebagai sumber pangan utama bagi konsumen, tetapi dapat meliputi berbagai sumber pangan, sebagai hasil diversifikasi pangan sesuai dengan kebiasaan/ budaya masyarakat setempat,

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.



Capaian kinerja indikator ini diperoleh dari jumlah masyarakat yang dibantu oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang rentan pangan, dalam hal ini diakibatkan oleh bencana alam. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan maksimal senilai Rp. 500.000,-

per Kepala Keluarga. Bantuan ini awalnya ditargetkan untuk 810 Kepala Keluarga, namun saat realisasinya mencapai 889 KK.

Penanganan masyarakat rawan pangan dilakukan terhadap daerah rawan pangan baik itu disebabkan rawan pangan kronis maupun transien. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan structural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, system pemerintahan daerah, infrastruktur public, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain. Sedangkan rawan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat seperti penyakit menular, bencana alam, gagal panen, penduduk yang mengalami gizi buruk, Rumah Tangga Miskin (RTM), ibu hamil dan ibu menyusui yang diindikasikan kurang gizi, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, migrasi dan lain-lain. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan penghidupan pada rumah tangga, menurunnya ketahanan hidup dan kerawanan pangan kronis.

Untuk tahun 2017 penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah berupa bahan pangan yang diberikan kepada masyarakat yang diindikasikan rawan pangan akibat bencana alam sebanyak 889 Kepala Keluarga. Adapun alokasi penanganan rawan pangan tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Bantuan berupa bahan pangan Tahap I sebanyak 170 Kepala Keluarga di
  - 100 KK di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
  - 70 KK Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota
2. Bantuan berupa bahan pangan Tahap II sebanyak 148 Kepala Keluarga
  - 101 KK di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar, Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar dan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
  - 47 KK di Nagari Lalan dan Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
3. Bantuan berupa bahan pangan Tahap III sebanyak 465 Kepala Keluarga, diantaranya:
  - 50 KK di Nagari Nan tujuh dan Nagari Koto Rantang, Kec. Palupuh, Kab. Agam
  - 50 KK di Payo, Kel. Tanah Garam, Lubuk Sikarah, Kota Solok
  - 15 KK di Nagari Siguntur dan Nagari Timpeh, Kab. Dharmasraya
  - 15 KK di Nagari Tanjung Bonai Selatan Nagari Unggan dan Nagari Silantai, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung
  - 50 KK di Nagari Lubuk Layang, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman
  - 51 KK di Kel. Koto Lalang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang
  - 49 KK di Lembang Jaya, Danau Kembar, Sungai Lasi, X Koto Singkarak, dan Payung Sekaki, Kab. Solok

- 26 KK di Sangir Batang Hari, Koto Parik Gdg diateh, Sei Pagu, Pauh duo, Sangir, Sangir jujuan, dan Sangir Balai janggo, Kab. Solok Selatan
  - 159 KK di Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kec. Koto Parik Kadang diateh, Kab. Solok Selatan
4. Bantuan berupa bahan pangan Tahap IV sebanyak 106 KK di Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat.

Untuk melihat lokasi yang telah menerima bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) di Sumatera Barat dari tahun 2013 - tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23 : Lokasi Penerima Dana Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2017

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Bantuan (Rp)					Ket.
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agam	Tanjung Raya	5.940.000	-	-	-		
		Palupuh					21.550.000	
2	Pesisir Selatan	IV Nagari Bayang Utara	8.159.000	-	-	-		
		Koto XI Tarusan	6.997.200					
		Air Pura	-	12.347.300	-	-		
		IV Jurai	-	-	28.000.000	-		
		IV Nagari Bayang Utara	-	-	7.600.000	-		
3	Pasaman	Rao Utara	19.900.000	-	-	-		
		Tigo Nagari	37.998.700	-	-	-		
		Panti	-	-	-	13.000.000		
		Rao Selatan					21.850.000	
4	Kota Padang	Lubuk Kilangan	-	-	-	-	17.917.000	
5	Pasaman Barat	Sasak Ranah Pasisia	16.000.000	-	-	-		
		Talamau	-	30.771.000	-	-		
		Ranah Batahan					50.704.040	
6	Tanah Datar	Lintau Buo	-	-	-	15.000.000		
7	Padang Pariaman	Lubuk Alung	-	-	-	10.000.000		
8	Sijunjung	Tanjung Gadang	-	6.360.000	-	-		
		Kamang Baru					46.700.000	
		Lubuk Tarok					21.949.000	
		Sumpur Kudus					6.600.000	
9	Kota Solok	Lb. Sikarah	-	-	20.000.000	-	21.550.000	
		Lb. Sikarah			15.600.000	-		
10	Limapuluh Kota	Harau					32.340.000	
11	Dharmasraya	Koto Besar dan Pulau					47.167.000	
		Punjung					6.600.000	
		Sitiung dan Timpeh						
12	Kab. Solok	Lembang Jaya, Danau Kembar, Sungai Lasi, X Koto Singkarak dan Payung Sekaki					21.560.000	
13	Kab. Solok Selatan	Sangir Batang Hari, Koto Parik Gdg diateh, Sei Pagu, Pauh duo, Sangir, Sangir jujuan, dan Sangir Balai janggo					11.440.000	
		Koto Parik Kadang diateh					76.434.480	
<b>Jumlah</b>			<b>94.994.900</b>	<b>49.478.300</b>	<b>71.200.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>404.361.520</b>	

### c. Ketersediaan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional ditujukan ditujukan untuk mengatasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak dan politik harga pangan dan / atau keadaan darurat.



Cadangan pangan (beras) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah cadangan pangan bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan cadangan pangan akan berdampak tidak saja pada aspek pangan tetapi juga pada berbagai bidang yang terkait.



Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan

antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Untuk tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak 100 ton ekuivalen beras, dan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divre Padang penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terealisasi 100 %.

Permentan Nomor 65 Tahun 2010 menegaskan bahwa hingga tahun kelima penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan (tahun 2015), minimal jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi adalah sebesar 200 ton. Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pangan hingga tahun 2015 sudah memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi. Hal ini ditambah lagi dengan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (beras) Tahun 2017 sebesar 100 ton (100.000 kg). Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (penyediaan dan penyalurannya) hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 24. Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (penyediaan dan penyalurannya) hingga tahun 2017**

Tahun	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (kg)	Pengeluaran (kg)	Stock Saat ini (kg)	Lokasi Penyaluran CPP
2010	30,000	-	30,000	
2011	54,000	15,000	69,000	Kec. Pangkalan Kab. 50 Kota (10 ton) dan Kec. Kinali Kab. Pasbar (5 ton)
2012	20,800	10,000	79,800	Kec. Simpati Kab. Pasaman (5 ton) dan Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang (5 ton)
2013	30,000	10,000	99,800	Kenagarian Koto Rajo dan Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kab. Pasamar
2014	50,000	-	149,800	-
	68,000	14,000	203,800	Kec. Sasak dan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat
2015	50,000	-	253,800	
2016	22,000	43,800	232,000	Kab. Solok Selatan (25 ton), Kab. Pasaman (10 ton) dan Kab. Pasaman Barat (8,8 ton)
2017	100,000	30,000	302,000	Kab. Pesisir Selatan (10 ton), Kab. Solok (10 ton), Kab. Lima puluh kota (10 ton)
<b>Jumlah</b>	<b>324,800</b>	<b>122,800</b>	<b>302,000</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga Tahun 2017 sebanyak 302.000 kg (302 ton). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur



Nomor 34 Tahun 2016, maka cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat disalurkan untuk daerah-daerah yang terkena bencana atau darurat rawan pangan untuk mengurangi terjadinya rawan pangan. Berdasarkan hal tersebut maka cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini telah disalurkan sebanyak 122.800 kg (122,8 ton) kepada kabupaten / kota yang terkena dampak bencana. Sehingga jumlah stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini (kondisi 31 Desember 2017) sebesar 302.000 kg (302 ton).

### d. Kelembagaan Pangan

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat telah dibentuk sejak tahun 2000 seiring dengan pembentukan Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Nasional, Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat telah mengalami beberapa kali perubahan/revitalisasi.



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ditujukan untuk menumbuhkembangkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang diketuai langsung oleh Kepala Daerah yakni Gubernur/Bupati/Walikota. Sehingga keberadaan DKP di daerah menjadi proaktif dalam menyikapi kondisi dan persoalan pangan yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan diperkuat dengan legalitas formal oleh Kepala Dinas Pangan Sumbar Nomor 520/1487/Sb-DP/2017 tertanggal 19 Maret

2017. Dalam keputusan tersebut digambarkan tentang setiap rangkaian pelaksanaan kegiatan dan personel yang terlibat dalam mensukseskan acara Rapat Koordinasi dimaksud.

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, di Propinsi Sumatera Barat telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 520 – 608 - 2017 tentang keberadaan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dari Keputusan Gubernur. Selain itu, juga dalam SK Gubernur Sumbar tercantum juga kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Diselenggarakannya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Propinsi Sumatera Barat, ditujukan untuk mempermudah koordinasi antara SKPD/lintas sektoral dalam berkoordinasi bagi anggota DKP untuk mencari solusi persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, terutama dalam persoalan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak. Hadirnya Rapat Koordinasi di Provinsi Sumatera Barat bagi DKP Kabupaten/Kota memberikan semangat baru bagi aparat di daerah untuk dapat duduk bersama membahas persoalan yang menyangkut pangan dan persoalan ikutan yang bersinggungan dengan pangan dan gizi masyarakat. Wadah pertemuan Koordinasi, diharapkan memudahkan dan mempercepat proses kerja sama secara *Team Work* diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sehingga memperpendek rantai birokrasi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu juga untuk menjadi arahan bentukan kegiatan ditahun berikutnya.

Rapat Koordinasi DKP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 di Hotel Pangeran Beachs menghadirkan peserta dengan jumlah sebanyak 120 orang dihadiri oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumbar, Prof. Irwan Prayitno serta anggota DKP di Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Dewan Ketahanan Pangan dari Kabupaten/Kota seluruh Sumbar dengan tema, “ Melalui Program Aksi Nagari Mandiri Pangan Kita Percepat Penanganan Kawasan Tertinggal Rentan Pangan dan Gizi di Sumatera Barat.”

Aksi nagari mandiri pangan yang digencarkan saat ini tidak sekedar menelorkan program *rancak* saja, melainkan dititikberatkan kepada terciptanya sebuah nagari yang betul-betul mampu menghasilkan pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan nagari tersebut.

Guna mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” dilaksanakan melalui kegiatan APBD dan APBN sebagai berikut :

Tabel 25. Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>6.893.000.000</b>	<b>6.743.854.803</b>	<b>97,84</b>	
<b>APBD</b>	<b>4.262.500.000</b>	<b>4.144.162.400</b>	<b>97,22</b>	
<b>VII. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>4.262.500.000</b>	<b>4.144.162.400</b>	<b>97,22</b>	<b>-</b>
1 Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah	922.500.000	922.345.000	99,98	
2 Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan	1.900.000.000	1.833.743.780	96,51	
3 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan	100.000.000	91.714.600	91,71	
4 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	40.000.000	39.398.000	98,50	
5 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	100.000.000	97.571.900	97,57	
6 Analisa ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	99.237.800	99,24	
7 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	540.000.000	515.115.320	95,39	
8 Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	40.000.000	39.381.500	98,45	
9 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	170.000.000	169.712.000	99,83	
10 Penyusunan Database Ketahanan Pangan	60.000.000	58.219.500	97,03	
11 Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat	240.000.000	228.278.500	95,12	
12 Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	50.000.000	49.444.500	98,89	
<b>APBN</b>	<b>2.630.500.000</b>	<b>2.599.692.403</b>	<b>98,83</b>	
1 Kawasan Mandiri Pangan	2.215.500.000	2.188.176.500	98,77	
2 Pemantauan Ketersediaan Akses dan Kerawanan Pangan	220.000.000	217.312.800	98,78	
3 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	195.000.000	194.203.103	99,59	

### Sasaran 3 :

## Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen

**L**onjakan harga pangan memang isu sensitif bagi pemerintah. Kenaikan harga pangan seolah momok yang bisa merusak citra pemerintah karena hilangnya kepercayaan publik. Adanya gejolak harga pangan memberi dampak terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Keterbatasan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator adanya gangguan-gangguan terhadap proses distribusi seperti kurang baiknya sarana transportasi, adanya dampak iklim seperti banjir, gelombang tinggi dan sebagainya.

Gangguan pada pasokan dan harga pangan perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah, karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan dari seluruh



daerah propinsi dan kabupaten/kota secara cepat (*up to date*) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak harga.

Manajemen distribusi yang baik dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat sangat mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan sepanjang waktu. Hal ini membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menciptakan perundangan dan sebuah lembaga yang mampu memastikan terciptanya kondisi dimana seluruh masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses pangan secara mudah dengan harga yang rasional dan terjangkau sepanjang waktu. Pemerintah wajib menjaga stabilisasi harga agar tidak terjadi gejolak atau keresahan konsumen.

Stabilisasi Harga atau *price stabilization* yaitu tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan harga barang dan jasa tersebut selama periode tertentu. Salah satu upaya menjaga stabilisasi harga adalah dengan adanya penyediaan pangan nasional. Penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Dengan adanya cadangan pangan nasional yang mencukupi, diharapkan lonjakan harga di waktu-waktu tertentu dapat dicegah. Tetapi saat ini pemerintah baru memiliki cadangan pangan nasional sebatas komoditas beras saja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu peran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah menjaga stabilisasi harga guna melindungi produsen dan konsumen dan menjadi sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yaitu "Stabilnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen" dengan indikator "Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)" dan "Stabilisasi harga

bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)”. Tingkat capaian dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 26 Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	1	Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)				
	a. Beras	CV	10	6,14	100,00	
	b. Cabe Merah	CV	25	24,82	100,00	
	2	Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)	HPP	HPP	HPP	100,00
<b>Rata-Rata Capaian</b>					100,00	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Stabilnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen” adalah sebesar 100 %. Artinya bahwa indikator “Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)”, untuk beras berada dibawah 5 yang berarti bahwa tidak terjadi gejolak harga komoditi beras di Sumatera Barat. Begitu juga dengan CV cabe merah berada di bawah 25, yang berarti harga cabe merah masih stabil. Selanjutnya, indikator “Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen (HPP)” berada diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

### **a. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)**

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.



Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Pengalaman Tahun 1996 dan Tahun 1998 membuktikan bahwa terjadinya guncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis politik, terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam jangka waktu yang pendek. Untuk menghindari terulangnya

kejadian tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan stabilitas harga pangan yang komprehensif dan dapat merespon beberapa perubahan lingkungan strategis seperti dinamika ekonomi global dan perubahan sistem manajemen pemerintahan agar krisis ekonomi dan krisis politik tidak terulang kembali.

### ➤ **Stabilisasi Harga Bahan Pangan Beras di Tingkat Konsumen**

Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan beras di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10 %, apabila CV berada diatas 10 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen. Angka koefisien variasi diperoleh dari gejolak harga beras dalam satu periode dibandingkan dengan harga rata-rata beras pada periode tersebut. Gambaran gejolak harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27 : Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan beras dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2017

No	Bulan	Harga Rata-rata Beras KW I	Harga Rata-rata Beras KW II
		Tk. Konsumen	Tk. Konsumen
1	JANUARI	13.111	11.622
2	FEBRUARI	13.101	11.865
3	MARET	13.232	11.838
4	APRIL	12.927	11.750
5	MEI	12.810	11.290
6	JUNI	12.477	9.945
7	JULI	12.363	11.233
8	AGUSTUS	12.192	11.114
9	SEPTEMBER	12.281	11.204
10	OKTOBER	14.836	13.413
11	NOVEMBER	12.574	11.582
12	DESEMBER	12.668	11.762
	Rata-rata	12.881	11.551
	H-Max	14.836	13.413
	H-Min	12.192	9.945
	CV	5,47	6,80
	CV Rata-Rata	6,14	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok (beras) KW I sebesar 5,47 dan beras KW II 6,80. Sesuai dengan indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di Tingkat Konsumen yang ditargetkan pada tahun 2017 bahwa  $CV \leq 10\%$ , dan hal ini dapat dicapai dimana pada tahun 2017 nilai CV rata-rata harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen sebesar 6,14. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 100,00 dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian selama tahun 2017 harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di Sumatera Barat dapat dikatakan stabil.

Perbandingan perolehan Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Utama Beras tahun 2016 dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 28 : Coefisien Variasi Harga Beras Tahun 2016-2017**

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
a.	CV Beras KW I di tingkat Konsumen	4,55	5,47
b.	CV Beras KW II di tingkat Konsumen	5,25	6,80
	Rata-rata	4.90	6,14

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa CV harga rata-rata beras dari tahun 2016-2017 (beras KW I dan KW II) di tingkat konsumen masih berada di bawah 10, maka masih bisa dikatakan harga beras stabil.

➤ **Stabilisasi Harga Bahan Pangan Cabe Merah di Tingkat Konsumen**

Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 25 %, apabila CV berada diatas 25 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen. Angka koefisien variasi diperoleh dari gejala harga cabe merah dalam satu periode dibandingkan dengan harga rata-rata cabe merah pada periode tersebut. Gambaran gejala harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 29 : Gambaran Gejala Harga Bahan Pangan Cabe Merah dan Coefisen Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2017**

No	Bulan	Harga Rata-rata Cabe merah
		di tingkat konsumen
1	JANUARI	42.729
2	FEBRUARI	36.049
3	MARET	31.597
4	APRIL	24.472
5	MEI	25.681
6	JUNI	22.813
7	JULI	22.792
8	AGUSTUS	25.903
9	SEPTEMBER	30.694
10	OKTOBER	37.042
11	NOVEMBER	41.063
12	DESEMBER	44.444
	Rata-rata	32.106
	H-Max	44.444
	H-Min	22.792
	CV	24,82

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan utama cabe merah 24,82. Pada tahun 2017 stabilisasi harga bahan pangan pokok cabe merah di Tingkat Konsumen yakni  $CV \leq 25\%$  dapat tercapai. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 100,00 dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian selama tahun 2017 harga pangan utama cabe merah di tingkat konsumen di Sumatera Barat dapat dikatakan stabil.



Langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga ini selain dengan cadangan pangan pemerintah juga dengan melakukan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat melalui koordinasi dengan Bulog.

Untuk komoditi cabe merah tidak bisa dilakukan perbandingan perolehan Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Utama Cabe Merah antara tahun 2016 dengan 2017, karena indikator ini baru ada saat awal tahun 2017 yang ada dalam revisi renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan penambahan kewenangan dari perubahan nomenklatur. Perbandingan capaian kinerja Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 30 : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2016 dan 2017**

Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Capaian Kinerja	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2016	2017
Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Cefisien Variasi / CV)	$CV \leq 5$	4,90	$CV \leq 10$	6,14	100%	100%

## b. Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok (Gabah dan Beras) di Tingkat Produsen (HPP)

Untuk melihat Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen dapat dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Harga beras dan gabah di tingkat produsen harus lebih tinggi dari HPP. Apabila harga beras / gabah di tingkat produsen lebih rendah dari harga HPP, hal tersebut berindikasi terjadinya gejolak harga beras / gabah. Perbandingan capaian kinerja Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen Tahun 2016 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 31 : Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen (HPP) Tahun 2016 - 2017**

Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Capaian Kinerja	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2016	2017
Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di Tingkat Konsumen (HPP)	≥ HPP	> HPP	≥ HPP	> HPP	100%	100%

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Tahun 2017 adalah sama dengan HPP Tahun 2016 (sesuai Inpres No 5 Tahun 2015) yaitu :

- HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani sebesar Rp.3.700,- /kg
- HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Penggilingan sebesar Rp. 3.750,-/kg
- Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang BULOG Rp 4.600,-/kg
- Harga Beras di gudang perum BULOG sebesar Rp. 7.300,-/kg

Harga rata-rata gabah dan beras KW I dan KW II di tingkat produsen dari tahun 2016 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 32 : Harga rata-rata gabah dan beras KW I dan KW II di tingkat produsen Tahun 2016 - 2017**

No	Bulan	Harga Rata-rata Beras di tingkat Produsen Tahun 2016				Harga Rata-rata Beras di tingkat Produsen Tahun 2017			
		Gabah KW I	Gabah KW II	Beras KW I	Beras KW II	Gabah KW I	Gabah KW II	Beras KW I	Beras KW II
1	JANUARI	5.429	4.906	11.431	10.414	5.410	4.810	11.090	10.530
2	FEBRUARI	5.362	4.890	11.429	10.534	5.567	4.850	11.920	10.817
3	MARET	5.582	5.104	11.959	10.858	5.818	5.180	11.836	10.356
4	APRIL	5.761	4.966	11.559	10.559	5.657	5.011	12.033	10.293
5	MEI	4.949	4.621	11.139	10.111	5.442	4.921	11.899	10.646
6	JUNI	4.979	4.592	10.935	9.966	5.450	4.953	10.301	9.195
7	JULI	5.068	4.635	10.858	9.899	5.343	4.782	11.183	10.078
8	AGUSTUS	5.299	4.882	11.186	10.385	5.189	4.607	11.047	9.501
9	SEPTEMBER	4.786	4.274	9.933	8.767	5.125	4.530	11.160	9.804
10	OKTOBER	5.344	4.910	11.297	10.400	5.010	4.581	11.196	9.572
11	NOVEMBER	5.479	5.051	11.565	10.589	5.030	4.696	11.289	10.268
12	DESEMBER	5.272	4.861	11.719	10.753	5.298	4.921	11.522	10.575
	Rata-rata	5.276	4.808	11.251	10.270	5.362	4.820	11.373	10.136

Dilihat dari tabel di atas, untuk tahun 2016, harga rata-rata gabah dan beras kualitas I dan II di tingkat produsen adalah Rp. 5.276,- (Gabah KW I), Rp. 4.808,- (Gabah KW II), Rp. 11.251,- (Beras KW I), dan Rp. 10.270,- (Beras KW II). Jika dibandingkan dengan harga rata-rata beras di tingkat produsen untuk beras, gabah KW I dan KW II, harga semua komoditi tersebut berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu berarti bahwa harga beras dan gabah di tingkat produsen adalah stabil atau dengan kata lain tidak mengalami gejolak harga.

Untuk tahun 2017, harga rata-rata gabah dan beras kualitas I dan II di tingkat produsen adalah Rp. 5.362,- (Gabah KW I), Rp. 4.820,- (Gabah KW II), Rp. 11.373,- (Beras KW I), dan Rp. 10.136,- (Beras KW II). Jika dibandingkan dengan harga rata-rata beras di tingkat produsen untuk beras dan gabah KW I dan KW II, harga semua komoditi tersebut berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal itu berarti bahwa harga beras dan gabah di tingkat produsen juga stabil atau tidak mengalami gejolak harga.

Untuk mendukung capaian sasaran stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ;

**a. Distribusi Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang, setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut pemenuhan

kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat, disuatu wilayah menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Sesuai dengan perkembangan dan karakteristik komoditas pangan yang beragam, maka proses distribusi pangan yang terjadi antar wilayah, antara propinsi dan antar pulau adalah bersifat dinamis. Apabila sistem distribusi komoditas pangan berfungsi dengan baik, maka dalam kondisi normal proses distribusi komoditas bahan pangan mampu menggerakkan suatu komoditas pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen setiap saat, dalam jumlah dan kualitas yang cukup dan harga terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Ciri utama dari produksi komoditas bahan pangan adalah bersifat musiman, mudah rusak dan umumnya lokasi produsen pangan hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi. Dalam periode waktu tertentu seperti pada saat panen raya dimana produksi komoditas pangan berlimpah, harga komoditas pangan akan cenderung jatuh atau murah. Sebaliknya pada periode tertentu produksi pangan berkurang maka harga komoditas pangan akan cenderung meningkat.

Pada saat kondisi defisit, dimana daerah-daerah sumber produksi pangan sudah mulai berkurang dan produksi yang dihasilkan tidak lagi mencukupi kebutuhan konsumen, maka situasi pasar perlu dirangsang sehingga tercapai perdagangan antar daerah yang mencukupi. Dengan demikian tingkat harga di daerah tersebut tidak melebihi suatu tingkat tertentu yang dapat ditoleransi.

Demikian pula sebaliknya, pada saat kondisi di daerah-daerah sentra dimana produksi pangan mengalami surplus, maka perbedaan harga antar daerah harus dapat dijaga sedemikian rupa sehingga distribusinya dapat menyebar dan mengisi kantong-kantong di daerah-daerah yang mengalami kekurangan pangan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi dalam penyaluran kelebihan produksi pangan tersebut sehingga tingkat harga yang memadai dapat terjaga, baik disisi produsen maupun disisi konsumen.

Distribusi pangan pada dasarnya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dan karakteristik komoditas pangan yang beragam. Apabila sistem distribusi tidak berfungsi dengan baik karena sesuatu hal atau adanya masalah infrastruktur distribusi (ketersediaan transportasi darat, laut, udara, jalan, pelabuhan, gudang penyimpanan, cadangan pangan dll) yang kurang memadai dan kondisi iklim yang kurang mendukung untuk pendistribusian pangan maka stabilitas pasokan pangan akan terganggu yang akhirnya berdampak pada pasokan pangan yang kurang serta harga yang diterima oleh konsumen akan meningkat.

Distribusi pangan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk menyalurkan produk komoditas pangan dari produsen agar dapat sampai ke konsumen secara tepat waktu dan jumlah yang cukup serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Proses penyampaian produk komoditas pangan dari tingkat produsen seringkali harus melalui rantai pelaku-pelaku distribusi pangan untuk dapat sampai kepada konsumen pemakai akhir. Aspek distribusi dalam hal ini sangat berperan dalam rangka stabilisasi harga pangan. Gangguan yang terjadi pada subsistem distribusi pangan akan berpengaruh besar terhadap situasi ketahanan pangan, baik di wilayah konsumen maupun pada wilayah produsen.

Permasalahan yang sering terjadi dalam aspek distribusi pangan antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau daerah yang relatif jauh, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, serta banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi. Akibat dari permasalahan ini adalah terjadinya gangguan pasokan yang diindikasikan oleh terjadinya fluktuasi harga.

### **b. Akses Pangan**

Fokus ketahanan pangan tidak hanya pada penyediaan pangan tingkat wilayah tetapi juga penyediaan dan konsumsi pangan tingkat daerah dan rumah tangga bahkan individu dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan ini dapat kita analisa dari diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut dinyatakan juga bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, dan pemerintah (pusat dan daerah) bertanggungjawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumahtangga dan perorangan.

Berdasarkan hal tersebut memperkuat akses pangan masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara konsep, akses pangan dipengaruhi oleh aspek fisik, ekonomi dan sosial. Aspek fisik dicirikan oleh ketersediaan pangan disuatu wilayah baik sebagai hasil produksi setempat maupun pasokan dari daerah lain yang kondisinya sangat tergantung pada jalur distribusi dan prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan pasar. Aspek ekonomi terkait dengan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan dan aspek sosial meliputi pendidikan dan modal sosial masyarakat.

Permasalahan akses pangan dapat bersifat sesaat maupun kronis. Permasalahan yang bersifat sesaat biasanya disebabkan oleh adanya gangguan terhadap potensi sumber daya seperti konflik sosial dan bencana alam. Sedangkan yang bersifat kronis yang umumnya terjadi di daerah rawan pangan dapat disebabkan karena adanya ketimpangan pada salah satu aspek tersebut diatas atau atau bahkan ketiga-tiganya, sehingga penanganan yang harus diambil akan berbeda sesuai dengan penyebab timbulnya masalah aksesibilitas pangan tersebut dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan sumberdaya setempat.

Faktor ketersediaan sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dapat dilihat dari besaran stok atau cadangan pangan, di samping besaran produksi dan jumlah pangan yang masuk dan keluar wilayah. Penggilingan memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan di suatu wilayah, antara lain: (1) Sebagai penyedia kebutuhan masyarakat; (2) Menjadi titik sentral dari suatu kawasan industri produksi padi, karena berfungsi sebagai titik pertemuan antara perubahan bentuk padi menjadi hasil utama berupa beras; (3) Menentukan jumlah ketersediaan beras, mutu dan kualitas beras; (4) Menentukan tingkat harga jual dan pendapatan yang diperoleh petani serta tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen; dan (5) Mampu membuka lapangan pekerjaan di daerah pedesaan.

Besaran stok sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Gejolak harga pangan di tengah masyarakat dapat ditekan apabila stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Selain itu, pergerakan gabah dan beras mempengaruhi tingkat stok gabah dan beras di suatu usaha penggilingan. Kekurangan stok akan dipenuhi oleh pasokan dari luar wilayah penggilingan bersangkutan. Oleh karena itu, informasi mengenai besarnya stok pangan (gabah dan beras) di penggilingan secara regular serta alur pergerakan gabah dan beras di suatu penggilingan sangat diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan ketersediaan pangan, terutama pada waktu-waktu tertentu dimana terjadi gejolak harga pangan.

### c. Informasi harga dan Pasokan Pangan

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Penyediaan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

Untuk mendapatkan pelayanan informasi harga dan pasokan pangan secara cepat dan akurat, diperlukan ketersediaan data/informasi harga dan pasokan pangan (jumlah dan jenis komoditi yang diberikan, serta frekuensi ketersediaan data dan informasi), selanjutnya perlu disiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mengumpulkan data/informasi serta menganalisis harga, dan pasokan pangan.

Guna mendukung pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan APBD dan APBN sebagai berikut :

**Tabel. 33 Dukungan Kegiatan (APBD dan APBN) untuk Pencapaian Sasaran Strategis Stabilitasnya Harga Pangan Utama di Tingkat Produsen dan Konsumen**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen</b>	<b>2.477.500.000</b>	<b>2.384.621.470</b>	<b>96,25</b>
<b>APBD</b>	<b>386.500.000</b>	<b>378.679.800</b>	<b>97,98</b>
<b>VII. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>386.500.000</b>	<b>378.679.800</b>	<b>97,98</b>
1 Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan	136.500.000	132.604.900	97,15
2 Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	200.000.000	196.329.900	98,16
3 Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	50.000.000	49.745.000	99,49
<b>APBN</b>	<b>2.091.000.000</b>	<b>2.005.941.670</b>	<b>95,93</b>
1 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	1.475.000.000	1.395.120.100	94,58
2 Lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi	367.000.000	363.442.200	99,03
3 Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan	249.000.000	247.379.370	99,35

## 2. CAPAIAN KINERJA TINGKAT PROVINSI DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengukuran target kinerja tingkat provinsi yang terdapat pada indikator RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hasil pengukuran kinerja Tingkat Provinsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 34. Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Tingkat Provinsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor pola pangan harapan	84,6	85,3 (Angka Sementara 2017)	100,83
NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI TRW IV (hingga Desember 2017)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	Diversifikasi Pangan	Rp 1.000.000.000,00	Rp 950.000.000	Rp 931.730.839	98,08

Capaian Kinerja Provinsi Dinas Pangan Sumbar ini juga terdapat pada sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Pangan Masyarakat serta pembahasannya juga telah diulas pada sasaran strategis tersebut.

#### **D. Analisis Akuntabilitas Keuangan**

Guna pencapaian sasaran-sasaran strategis yang menjadi perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pangan dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017, dialokasikan anggaran pendukungnya kedalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program ketahanan pangan, baik melalui dana APBD maupun APBN.

##### **a. Dukungan APBD**

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat terlaksana dari pagu dana sebesar Rp. 17.425.724.260,- berhasil terserap sebesar Rp. 17.150.499.187,- atau sebesar 98,42 % dengan sisa dana Rp. 275.225.073,-. Secara rinci realisasi fisik dan realisasi keuangan perkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35 : **Dukungan Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	% REALISASI	KET.
<b>OPD DINAS PANGAN</b>	<b>17.425.724.260</b>	<b>17.150.499.187</b>	<b>275.225.073</b>	<b>98,42</b>	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.138.712.297</b>	<b>8.097.220.127</b>	<b>41.492.170</b>	<b>99,49</b>	
I Gaji dan Tunjangan	6.076.369.543	6.051.404.074	24.965.469	99,59	
II. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.062.342.754	2.045.816.053	16.526.701	99,20	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.287.011.963</b>	<b>9.053.279.060</b>	<b>233.732.903</b>	<b>97,48</b>	
<b>I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.364.287.963</b>	<b>1.317.438.887</b>	<b>46.849.076</b>	<b>96,57</b>	
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.020.000	37.017.000	3.000	99,99	
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	256.555.963	234.136.418	22.419.545	91,26	
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	432.331.500	418.911.678	13.419.822	96,90	
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.100.500	25.061.750	38.750	99,85	
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.895.000	105.000	99,58	
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.280.000	20.160.000	120.000	99,41	
7 Penyediaan Makanan dan Minuman	18.000.000	17.952.000	48.000	99,73	
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	530.000.000	520.555.041	9.444.959	98,22	
9 Penyediaan Jasa Pembinaan fisik dan mental aparatur	20.000.000	18.750.000	1.250.000	93,75	
<b>II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>938.270.000</b>	<b>921.738.784</b>	<b>16.531.216</b>	<b>98,24</b>	
10 Pembangunan Gedung Kantor	614.000.000	605.958.000	8.042.000	98,69	
11 Pengadaan Desain Interior Gedung Kantor	43.000.000	42.780.000	220.000	99,49	
12 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000	67.600.000	2.400.000	96,57	
13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ mess	50.000.000	49.925.000	75.000	99,85	
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	94.720.000	89.117.784	5.602.216	94,09	
15 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	36.550.000	36.435.000	115.000	99,69	
16 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	30.000.000	29.923.000	77.000	99,74	
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>54.540.000</b>	<b>52.822.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>96,85</b>	
17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54.540.000	52.822.000	1.718.000	96,85	
<b>IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>14.224.000</b>	<b>9.365.800</b>	<b>4.858.200</b>	<b>65,85</b>	
18 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.224.000	9.365.800	4.858.200	65,85	
<b>V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>235.090.000</b>	<b>234.303.800</b>	<b>786.200</b>	<b>99,67</b>	
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.000.000	23.567.800	432.200	98,20	
20 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	15.000.000	14.708.000	292.000	98,05	
21 Penatausahaan Keuangan SKPD	196.090.000	196.028.000	62.000	99,97	
<b>VI. PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN ASSET</b>	<b>126.600.000</b>	<b>121.236.250</b>	<b>5.363.750</b>	<b>95,76</b>	
22 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	75.000.000	70.192.700	4.807.300	93,59	
23 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	51.600.000	51.043.550	556.450	98,92	
<b>VII. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>5.604.000.000</b>	<b>5.464.642.700</b>	<b>139.357.300</b>	<b>97,51</b>	
24 Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah	922.500.000	922.345.000	155.000	99,98	
25 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar ( Sertifikat Prima )	400.000.000	397.450.600	2.549.400	99,36	
26 Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan	1.900.000.000	1.833.743.780	66.256.220	96,51	
27 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan	100.000.000	91.714.600	8.285.400	91,71	
28 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat	40.000.000	39.398.000	602.000	98,50	
29 Pemasarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikat Prima	40.000.000	38.923.600	1.076.400	97,31	
30 Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamaan Pangan Jajanan Anak Sekolah ( SD/MTs )	40.000.000	39.527.500	472.500	98,82	
31 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	100.000.000	97.571.900	2.428.100	97,57	
32 Analisa ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	99.237.800	762.200	99,24	

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA	% REALISASI	KET.
33 Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang beredar di Masyarakat	200.000.000	196.104.000	3.896.000	98,05	
34 Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP )	540.000.000	515.115.320	24.884.680	95,39	
35 Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	40.000.000	39.381.500	618.500	98,45	
36 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	170.000.000	169.712.000	288.000	99,83	
37 Penyusunan Database Ketahanan Pangan	60.000.000	58.219.500	1.780.500	97,03	
38 Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan	136.500.000	132.604.900	3.895.100	97,15	
39 Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	200.000.000	196.329.900	3.670.100	98,16	
40 Gerakan Hari Pangan Se Dunia Tingkat Provinsi dan Nasional	200.000.000	197.154.800	2.845.200	98,58	
41 Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat	240.000.000	228.278.500	11.721.500	95,12	
42 Surveil dan Pengawasan Pangan Segar Tingkat Produsen	75.000.000	72.640.000	2.360.000	96,85	
43 Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	50.000.000	49.444.500	555.500	98,89	
44 Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	50.000.000	49.745.000	255.000	99,49	
<b>VI PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN</b>	<b>950.000.000</b>	<b>931.730.839</b>	<b>18.269.161</b>	<b>98,08</b>	
45 Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi	130.000.000	125.652.439	4.347.561	96,66	
46 Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal	350.000.000	343.657.200	6.342.800	98,19	
47 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP )	140.000.000	139.239.600	760.400	99,46	
48 Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal	100.000.000	97.550.000	2.450.000	97,55	
49 Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan ( P-KRPL )	230.000.000	225.631.600	4.368.400	98,10	

**b. Dukungan APBN**

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang didanai oleh APBN dari dana dekonsentrasi dengan pagu dana sebesar Rp. 6.030.500.000,- berhasil terserap oleh Dinas Pangan Sumatera Barat sebesar Rp. 5.854.646.332,- atau sebesar 97,08% dengan sisa dana Rp. 175.853.668,-. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,02 %. Secara rinci realisasi fisik dan realisasi keuangan perkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 36 : **Dukungan Anggaran APBN, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN / DANA (Rp.)			REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
				DK	TP	JUMLAH	FISIK (%)	KEUANGAN		
								Rp.	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
089266	DANA DEKONSENTRASI			6,030,500,000	0	6,030,500,000	99.02	5,854,646,332	97.08	175,853,668
14	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			6,030,500,000	0	6,030,500,000	99.02	5,854,646,332	97.08	175,853,668
1814	PENGEMBANGAN SISTIM DISTRIBUSI DAN STABILISASI HARGA PANGAN			2,091,000,000	0	2,091,000,000	97.17	2,005,941,670	95.93	85,058,330
108	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	14	Gapoktan	1,475,000,000	0	1,475,000,000	95.99	1,395,120,100	94.58	79,879,900
110	Lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi	5	Unit	367,000,000	0	367,000,000	100.00	363,442,200	99.03	3,557,800
111	Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan	1	Lokasi	249,000,000	0	249,000,000	100.00	247,379,370	99.35	1,620,630
1815	PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN			689,000,000	0	689,000,000	100.00	659,662,200	95.74	29,337,800
106	Kawasan Mandiri Pangan	3	Kawasan	564,000,000	0	564,000,000	100.00	536,096,700	95.05	27,903,300
107	Pemantauan Ketersediaan akses dan Kerawanan Pangan	1	Lokasi	125,000,000	0	125,000,000	100.00	123,565,500	98.85	1,434,500
1816	PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR			2,630,500,000	0	2,630,500,000	100.00	2,599,692,403	98.83	30,807,597
101	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	90	Desa	2,215,500,000	0	2,215,500,000	100.00	2,188,176,500	98.77	27,323,500
106	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	1	Rekomendasi	220,000,000	0	220,000,000	100.00	217,312,800	98.78	2,687,200
107	Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	1	Lokasi	195,000,000	0	195,000,000	100.00	194,203,103	99.59	796,897
1817	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN			620,000,000	0	620,000,000	100.00	589,350,059	95.06	30,649,941
950	Layanan dukungan manajemen Esselon I	4	Layanan	620,000,000	0	620,000,000	100.00	589,350,059	95.06	30,649,941

Tabel 37 : Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan per program pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI KEUANGAN	% REALISASI FISIK
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5.604.000.000	5.464.642.700	97,51	100
2	Program Diversifikasi Pangan	950.000.000	931.730.839	98,08	100
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.030.500.000	5.854.646.332	97,08	99,02
	<b>Jumlah</b>	<b>12.584.500.000</b>	<b>12.251.019.871</b>	<b>97,35</b>	

Bila dilihat dari pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang keseluruhannya mencapai 100% bahkan lebih, sedangkan realisasi keuangannya

dibawah 100 % (rata-rata 97,35 %), artinya dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini terdapat efisien biaya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh dana baik APBD maupun APBN. Dari dana APBD terdapat 2 program, yaitu Program Ketahanan Pangan dan Program Diversifikasi Pangan. Sedangkan dukungan APBN melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Alokasi anggaran Ketahanan Pangan Sumatera Barat Tahun 2013 s/d 2017 baik melalui APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 38. Alokasi Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2017**

No.	Pendanaan	Anggaran (Rp,-)				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	APBN	20.075.050.000	10.754.138.000	12.992.679.000	12.848.330.000	6.030.500.000
1	Dekonsentrasi (DK)	15.570.850.000	8.662.638.000	11.101.372.000	12.848.330.000	6.030.500.000
2	Tugas Pembantuan (TP)	4.504.200.000	2.091.500.000	1.891.307.000	-	-
B	APBD	16.992.417.675	17.001.138.238	17.830.971.266	18.116.523.684	17.425.724.260
1	Belanja Tidak Langsung	6.947.578.165	7.450.341.238	8.010.385.386	8.117.614.434	8.138.712.297
2	Belanja Langsung	10.044.839.510	9.550.797.000	9.820.585.880	9.998.909.250	9.287.011.963
	J u m l a h	37.067.467.675	27.755.276.238	30.823.650.266	30.964.853.684	23.456.224.260

# BAB IV

## PENUTUP

*BAB IV, berisi :*

*a. Kesimpulan*

*b. Rekomendasi*

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan

(2017), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pangan pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena kesemua indikator memenuhi kriteria sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai kepala daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan dan isu-isu ketahanan pangan masih menjadi focus perbaikan kinerja Dinas Pangan kedepannya. Pertama, walaupun pencapaian IKU sudah sangat baik, namun belum semua permasalahan ketahanan pangan di masyarakat terjawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak pada aspek ketersediaan bahan pangan dimana saat ini kondisi lahan yang semakin sempit akibat pembangunan. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya bencana banjir, longsor dan kekeringan diluar kontrol manusia. Peran Dinas Pangan Sumbar sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil.

Kedua, belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras, sehingga bisa saja terjadi fluktuasi harga yang ekstrim terhadap bahan pangan tertentu dalam kondisi tertentu. Disamping itu belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan

Ketiga, masih tingginya ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu terutama beras. Karena bagi masyarakat Sumatera Barat "belum kenyang kalau belum makan nasi". Belum optimalnya pengolahan pangan lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan sehat serta masih belum optimalnya pengawasan keamanan pangan terpadu juga menjadi tantangan Dinas Pangan Sumbar kedepannya.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

### **B. Rekomendasi**

1. Pendekatan ketersediaan pangan tercermin dari berbagai kebijakan yang mengoptimalkan produksi pangan. Berbagai kebijakan di bidang pertanian sebagian besar diarahkan untuk peningkatan produksi padi. Oleh sebab itu sejauh mungkin perlu diusahakan swasembada pangan (beras). Jika swasembada di tingkat nasional sudah tercapai, maka langkah selanjutnya menjamin ketersediaan pangan di tingkat regional melalui BULOG. Rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
  - Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat
  - Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi)

- Mengkoordinasikan dan mengembangkan cadangan pangan dan pemantapan kelembagaan pangan
  - meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan
  - Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
2. Agar individu atau rumah tangga dapat memiliki akses terhadap pangan, maka pemerintah harus berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen. Rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan antara lain :
- Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien
  - Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan
  - Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan
  - Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat
  - Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) dan penyusunan peta rawan pangan melalui Sistem Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG).
3. Dalam rangka meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain :
- Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
  - Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
  - Mendorong peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu
  - Selalu mempromosikan olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional
  - Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, sosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan
4. Menambah jenis cadangan pangan nasional, tidak hanya beras, tetapi juga komoditi lainnya seperti bawang, cabe, dan lainnya.

**PENGHARGAAN-PENGHARGAAN**

**A. PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017**

Salah satu bentuk apresiasi dan pendorong semangat, kreativitas serta partisipasi masyarakat untuk berperan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2017 ini Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan berupa Adhikarya Pangan Nusantara untuk 5 (lima) kategori ketahanan pangan untuk tingkat provinsi, yaitu Kategori Pembina Ketahanan Pangan, Kategori Pelopor Ketahanan Pangan, Kategori Pemangku Ketahanan Pangan, Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan. Berikut Daftar Pemenang APN. Prov Sumatera Barat Tahun 2017:



**I. KATEGORI PEMBINA KETAHANAN PANGAN**

**a. KABUPATEN/KOTA (Urutan sesuai abjad nama)**

Urutan	N A M A	KABUPATEN/KOTA
A.	Ali Yusuf	Kota Sawahlunto
B.	Mahyeldi	Kota Padang
C.	Yuswir Arifin	Kabupaten Sijunjung

**b. PEMERINTAHAN NAGARI/DESA/KELURAHAN**

Peringkat	N A M A	KABUPATEN/KOTA
Peringkat I	Marhalim	Nagari Kandang Baru Kec. Sijunjung Kabupaten Sijunjung
Peringkat II	Andestra.	Nagari Koto Tinggi Kec.Koto Besar Kab. Dharmasraya
Peringkat III	Septarial	Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman

II. KATEGORI PELOPOR KETAHANAN PANGAN

Peringkat	N A M A	KABUPATEN/KOTA
Peringkat I	Al Najmi M.Gafar	Nagari Koto Gaek Guguak Kab. Solok
Peringkat II	Rahmi.	Kel. Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Peringkat III	Arya Sudarsa	Nagari kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

III. KATEGORI PEMANGKU KETAHANAN PANGAN

Peringkat	N A M A	KABUPATEN/KOTA
Peringkat I	Yusrizal	Kel.Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Ko. Solok
Peringkat II	Halim Antoni	Jorong Talang Nagari Talang Maur Kec. Mungka Kabupaten 50 Kota
Peringkat III	Dien Novrita	Korong Simpang Nagari Lurah Ampalu Kec. VII Koto Sungai Sarik Kab. Padang Pariaman

IV. KATEGORI PELAYANAN KETAHANAN PANGAN  
(PENYULUH PENDAMPING)

Peringkat	N A M A	KABUPATEN/KOTA
Peringkat I	Nama Wilayah Binaan Kecamatan Kabupaten	Yonizaldi Hakim, SP PPWKP IV Koto Mudik Lengayang Pesisir Selatan
Peringkat II	N a m a Wilayah Binaan Kecamatan Kota	Santy Budi Harty, SP Kota Bukutinggi - Bukittinggi
Peringkat III	N a m a Wilayah Binaan Kecamatan Kabupaten	Jasril Nag. Sungayang Sungayang Tanah Datar

V. KATEGORI PELAKU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

A. KELOMPOK PERMBERDAYAAN

Peringkat	N A M A	KABUPATEN/KOTA
Peringkat I	N a m a Nagari Kecamatan Kota	KWT Tanjung Indah Tumbuk Tangah Talawi Sawahlunto
Peringkat II	N a m a Nagari Kecamatan Kota	Dasawisma Melati III RT03 RW 02 Rawang/Padang Selatan Padang
Peringkat III	N a m a Kelurahan Kecamatan Kota	Kel. LDPM Ganting Mandiri Ganting Padang Panjang Timur Padang Panjang

B. KELOMPOK INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN

Peringkat	N A M A	KABUPATEN/KOTA
Peringkat I	N a m a Kelurahan Kecamatan Kabupaten	UP3HP Indah Sari Kamang Hilia Kamang Magek Agam
Peringkat II	N a m a Desa Kecamatan Kota	Klp Tani Tunas Muda Muaro Kalaban Silungkang Sawahlunto
Peringkat III	N a m a Kelurahan Kecamatan Kota	UMKM Keripik Endang Kampung Jawa Tanjung Harapan Solok

**B. PENGHARGAAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2013 - 2017**

**1. Tahun 2013**

- Komitmen Pengembangan Sentra Kakao dalam Pemberdayaan petani dari Swiss Contact dan ADM Cocoa Singapura.

- Sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Komitmen Program Sub Sektor Perkebunan dengan Bantuan Innova Tahun 2013
- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”

**2. Tahun 2014**

- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”, kategori
  - ✓ Pembina Ketahanan Pangan tingkat Gubernur (**Prof. DR. Irwan Prayitno, P.Si, MSC**, Gubernur Sumatera Barat)
  - ✓ Pembina Ketahanan Pangan Tingkat Kepala Desa (**Yoharman, S.Ag**, Kepala Desa Aia Manggih Kab. Pasaman)
  - ✓ Pelaku Ketahanan Pangan / Pemberdayaan (**KWT Melinjo Indah**, Kabupaten Pesisir Selatan)
  - ✓ Pelayanan / Penyuluh Ketahanan Pangan (**Irma Mustika Huryati, Sp**, Kabupaten Pasaman)

**3. Tahun 2015**

- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara”, kategori
  - ✓ Industri Pengolahan Pangan (**Kelompok Tani Kembang Sari Prima** dari Kab. Agam)
  - ✓ Pemberdayaan masyarakat (**KWT Bunga Melati** dari Kota Payakumbuh)
  - ✓ Pelayan/pendamping Ketahanan Pangan (**Ade Candra SPt** dari Kab. Pasaman)
  - ✓ Pembina Ketahanan Pangan tingkat Nagari/Walinagari. (**Reflismen** dari Kab. Agam)

**4. Tahun 2016**

- Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara” , kategori :

No	Nama	Alamat	Kategori
1.	Joni Saputra	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat	Pelopop Ketahanan Pangan
2.	Gapoktan Albasiko II, Ketua: Karno Fahrudin	Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
3.	Kelompok Unit Pelayanan, Pengembangan, Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) Pelangi Ketua: Zuharnita	Kel. Bukit Apit Puhun, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat	Pelaku Pengembangan Industri Pangan Olahan/Perakitan Teknologi Pangan
4.	Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc	Provinsi Sumatera Barat	Pembina (Gubernur)
5.	Pujiyono	Walinagari Sungai Pulai, Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Pembina (Kepala Desa/Lurah)

**5. Tahun 2017**

- Satya Lencana Pembangunan Bidang Pangan Tingkat Nasional pada Penas Tani XV di Aceh



Kepala Dinas Pangan Sumbar Menerima Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2013 oleh Wakil Presiden RI



Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2014 oleh Presiden RI



Penyerahan Penghargaan pada Bulan Mutu Pertanian Tahun 2014



Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2015 oleh Presiden RI, yang diwakili oleh KWT Kembang Sari Prima Kab. Agam



Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2016 yang diserahkan oleh Presiden RI



Gubernur Sumbar menerima Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Tahun 2017 yang diserahkan oleh Presiden RI